

**TINGKAT PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(1987-2002)**

SKRIPSI



Oleh :

**Nama : Ratnawati Sukaning Tyas
Nomor Mahasiswa : 01313050
Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA**

2005

TINGKAT PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(1987-2002)

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Ratnawati Sukaning Tyas
Nomor Mahasiswa : 01313050
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
2005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, April 2005

Penulis,

Ratnawati Sukaning Tyas

--

PENGESAHAN

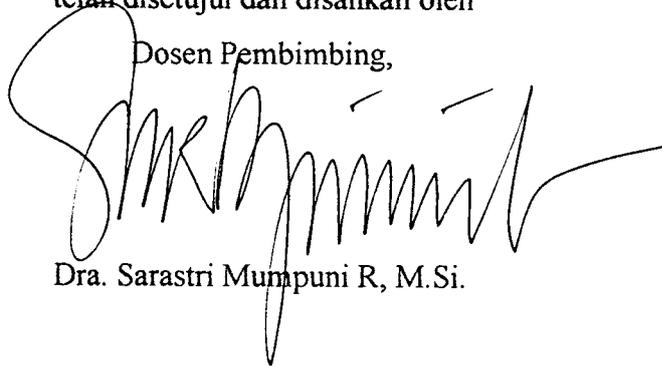
TINGKAT PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : Ratnawati Sukaning Tyas
Nomor Mahasiswa : 01313050
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, April 2005

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**TINGKAT PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

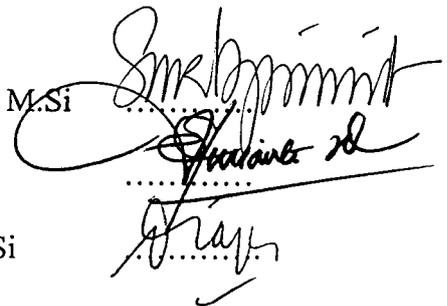
**Disusun Oleh: RATNAWATI SUKANINGTYAS
Nomor mahasiswa: 01313050**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 16 Mei 2005

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si

Penguji I : Drs. Nur Feriyanto, M.Si

Penguji II : Dra. Diana Wijayanti, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

MOTTO

Kebahagiaan adalah api suci yang menjaga
agar tujuan kita tetap hangat dan
kepandaian kita tetap bersinar
Yakinlah untuk tetap semangat
dan bersama dengan kebahagiaanmu ,
kamu akan membentuk harapan
yang tak terkalahkan dalam melawan kesulitan.

(Helen Keller)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini ku persembahkan kepada :

- Bapak Sutarno dan Mamah Sri Purwonowati tercinta yang selalu mengiringi langkahku dengan kasih sayang dan doa
- Adik-adikku terkasih Yulita Heny Kusumawati dan (Alm) Trya Zagitha Nur Fadillah
- Yang tersayang LETDA TEK Dudy Darmawan

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan judul "Tingkat Pemerataan Distribusi Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (1987-2002)". Salam serta sholawat tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan tentang Islam, Syaria't dan hakikatnya.

Bersamaan dengan ini penulis menyadari tanpa dukungan dan pengorbanan dari berbagai pihak , penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan kesempatan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Nur Feriyanto, M.Si dan Ibu. Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku dosen penguji skripsi serta seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Keluarga MARSMA (Purn) H. Hidayat Wiradimadja, MSc di Bandung (Papih, Mamih, Aa Indra, Teh Nia, Wa' Isah terima kasih atas dukungan

dan do'anya), Aa Dudy terima kasih atas semangat, do'a, kasih sayang serta atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Keluarga Wiryo Munarjo (Bulik Mini, Bulik Anik, Bulik Harni, Bulik Maryati, Om Sapto, Om Hasto, Om Yono, Dipta, Rida dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu) terima kasih atas segalanya.
6. Rianti Utami, sahabat terbaikku! Persahabatan kita begitu indah, kebahagiaan dan kesedihan adalah selalu milik kita bersama. Makasih dah banyak ngebantu Yaz selama ini. (thx buat pesawat yang lucu2)☺
7. Bu Endang, Mba' Ien, Mba'Tat, Mb'Vi, Ulan, Dina, Veni, Tika, Lia, Yeni, Hafidh, Doni, Ariv, Hari, Ridwan, Hans, Abank, Wawan terima kasih atas segalanya.
8. Teman-teman di Bandung Letda Tek Aep Komarullah, Letda Tek Tubagus Fadillah, Letda Tek Hindro Muriadi, Letda Adm Yadi Rosmayadi, Letda Adm Hendra, Letda Lek Raden Ruli, Letda Lek P. Harjanto terima kasih, senang mengenal kalian.
9. Wahyu, Risna, Rika, Rini, Wiwid, Sinta, Watik, Esti, Dini, Asti, Tutik, Thomas, Shidiqi teman-teman EP yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaannya.
10. Kos Dzakya : Mb'Murni, Yona, Widya, Anna, Tommy, Refi, Nisa, Dewi, Rima, Nanik, Kotim, Ika, Fina, Hilda, Ana, Nanan.
11. Teman-teman KKN UNIT SL-31 Gandung, Adistya, Dessy, Lya, Angga, Yulia, Zaky, John, Arie, Lin. Kpn neh ngumpul lagi??

12. Mas Ismanto yang telah membantu, memberikan dukungan serta semangat, terima kasih banyak.

Penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat membantu penulisan dalam meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Terima kasih dan Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

	Halaman
HalamanJudul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penelitian	15

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Keadaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	16
2.1.1. Penduduk dan Tenaga Kerja	17
2.1.2. Tingkat Pendidikan	20
2.1.3. Pertanian.....	21
2.1.3.1 Tanaman Pangan	21
2.1.3.2 Perkebunan.....	22
2.1.3.3 Kehutanan.....	23
2.1.3.4 Peternakan.....	23
2.1.3.5 Perikanan.....	23
2.1.4. Perdagangan	24
2.1.5. Perkembangan Prasarana Panjang Jalan	24
2.1.6. Kondisi Pariwisata.....	25
2.1.7. Keadaan Perekonomian.....	25
BAB III KAJIAN PUSTAKA	29
BAB IV LANDASAN TEORI	
4.1 Teori Pertumbuhan.....	32
4.2 Distribusi Pendapatan.....	33
4.3 Menggabungkan Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan.....	36
4.4 Distribusi Pendapatan Perorangan	39
4.5 Distribusi Pendapatan Fungsional.....	40
4.6 Akibat dari Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan	41

4.7	Teori Tentang Pemerataan Distribusi Pendapatan	43
BAB V METODE PENELITIAN		
5.1.	Jenis dan Sumber Data	46
5.2.	Variabel-variabel yang Digunakan.....	46
5.2.1	Angka Gini Koefisien (GC)	46
5.2.2	Jumlah Kelas (K).....	46
5.2.3	Proporsi Jumlah Masyarakat Dalam Kelas i (f_i)	47
5.2.4	Proporsi Secara Kumulatif dari Jumlah Pendapatan Masyarakat Sampai Kelas ke- i	47
5.3.	Metode Analisis Data	47
5.3.1.	Metode Kualitatif.....	47
5.3.1.	Analisis Kuantitatif	48
5.3.3	Alat Analisis.....	48
5.3.4.	Indeks Gini dan Kurva Lorenz.....	51
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN		
6.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi D.I Yogyakarta	61
6.2.	Perhitungan Distribusi Pendapatan	52
6.2.1.	Gini Indeks	53
6.2.2.	Kurva Lorenz.....	57
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN		
7.1.	Kesimpulan.....	73
7.2.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999 – 2000.....	6
1.2. PDRB dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1987 - 2002	9
1.3. Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1987 – 2002.....	11
2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Susenas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Propinsi D.I. Yogyakarta.....	19
2.2. Jumlah Laki-laki dan Perempuan Pencari Pekerjaan, Lowongan dan Penempatannya di Propinsi D.I. Yogyakarta.....	21
2.3. Jumlah Sekolah , Kelas, Murid dan Guru SMU Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 1999/2000 – 2003/2004.....	22
2.4. Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Menurut Jenisnya dan Kabupaten/ Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta.....	24
2.5. Pertumbuhan Sektor PDRB Propinsi D.I. Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2001 – 2003.....	28
2.6. PDRB Propinsi D.I. Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Berlaku Tahun 2001 – 2003.....	30
5.1. Distribusi Presentase Pendapatan Per Kapita Menurut Golongan Pendapatan Propinsi D.I. Yogyakarta.....	49

6.5.	Pertumbuhan Sektor PDRB Propinsi D.I Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 2001 – 2002.....	53
6.1.	Presentase Pendapatan Per Kapita Dirinci Menurut Golongan Pendapatan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1987 – 2002.....	63
6.2.	Hasil Perhitungan Indeks Gini Propinsi D.I Yogyakarta Tahun 1987 – 2002.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Kurva Lorenz.....	45
5.1. Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2002.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Tabel Distribusi Presentase Pendapatan Setiap Golongan Pendapatan dan % Kumulatifnya.....	74
II. Tabel Prosedur Penghitungan Indeks Gini Distribusi Pendapatan di Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1987 – 2002.....	77
III. Gambar Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1987 – 1992.....	81
IV. Gambar Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1993 – 1998.....	82
V. Gambar Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1999 – 2002.....	83

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kesenjangan antar daerah. Perbedaan laju pembangunan antar daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus dan berarti pertumbuhan ekonomi juga bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

Pemerataan pendapatan mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat produktivitas penduduk. Pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan baik apabila ada produktivitas yang tinggi dari penduduk.

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan dalam penelitian ini menggunakan indeks gini dan kurva Lorenz.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa ketimpangan pendapatan di Propinsi D.I. Yogyakarta dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2002 relatif rendah. Dari tahun 1987-2002 rata-rata indeks gini Propinsi D.I Yogyakarta adalah 0,27688 atau lebih kecil dari 0,35 dan lebih besar dari 0, termasuk ketimpangan rendah atau dapat disimpulkan 40% penduduk dengan pendapatan rendah di Propinsi D.I Yogyakarta menerima lebih besar dari 17% pendapatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kesenjangan antar daerah. Perbedaan laju pembangunan antar daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antar daerah. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus dan berarti pertumbuhan ekonomi juga bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini bisa didapat lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau produk domestik bruto (PDB) setiap tahun. Walaupun bukan merupakan suatu indikator yang bagus, kesejahteraan masyarakat, dilihat dari aspek

ekonominya, dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Selain indikator ini harus juga dilihat bagaimana distribusi pendapatan nasional di negara tersebut. Semakin pincang distribusinya, semakin tidak berarti tingkat pendapatan rata-rata per kapita yang tinggi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional per kapita, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya tergolong besar dan tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi serta ditambah lagi dengan kenyataan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada awal proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat per kapita dapat tercapai.

Selama periode orde baru pemerintah kurang memperhatikan pola pembagian dari pertumbuhan itu sendiri (distribusi pendapatan). Hal ini mengakibatkan kesenjangan pendapatan antar kelompok kaya dan kelompok miskin membesar, bukannya mengecil.¹⁾ Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maka yang diperlukan adalah pemerataan terhadap hasil-hasil pembangunan.

¹⁾ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, Teori dan Temuan Empiris, GI, Jakarta, 2001, hlm. 38

Pemerataan ekonomi merupakan salah satu unsur penyusun dari stabilitas perekonomian karena apabila terjadi ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan stabilitas sulit tercapai. Stabilitas nasional diperlukan untuk terlaksananya pembangunan nasional ekonomi yang lancar dan dinamis. Upaya pemerataan sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan telah dilakukan sejak awal PJP I karena pembangunan telah dilaksanakan berdasarkan suatu trilogi yang mencakup bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan stabilitas. Pemerataan hasil-hasil pembangunan mempunyai tujuan untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selama PJP I, telah ditetapkan strategi pemerataan yang dinamakan "delapan jalur pemerataan", strategi ini merupakan sebagai pedoman atau cara yang harus ditempuh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk, delapan jalur pemerataan itu meliputi:

1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya sandang, pangan dan perumahan
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan berusaha
6. Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi pemuda dan wanita
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
8. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan

Hasil yang diperoleh telah dirasakan. Kesejahteraan masyarakat makin meningkat dan peningkatannya juga telah mencakup semua daerah. Tidak ada daerah yang tidak mengalami kemajuan dan hampir semua lapisan masyarakat tersentuh oleh kemajuan, meskipun tingkat kemajuan itu berbeda-beda.. Merupakan suatu kenyataan, bahwa kondisi ekonomi nasional tidaklah homogen, artinya terdapat keragaman ekonomi antar wilayah. Pemerataan pembangunan akan tercapai secara optimal jika terdapat unsur pelaksanaan dari bawah. Perencanaan pembangunan dari bawah merupakan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, dengan mengikutsertakan sumberdaya masyarakat secara optimal. Kemampuan perencana yang mampu memahami aspirasi masyarakat yang bersifat multidimensi serta memahami aspek sosial ekonomi dalam perencanaan merupakan unsur utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kemampuan dalam menentukan kegiatan pembangunan yang paling sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat, merupakan prasyarat untuk mendayagunakan sumberdaya secara optimal. Dengan kondisi ini perencanaan dari bawah akan selaras dengan program pembangunan nasional.

Pemerataan pendapatan mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat produktivitas penduduk. Pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan baik apabila ada produktivitas yang tinggi dari penduduk. Menurut Kuznets, laju kenaikan produktivitas ternyata dapat menjelaskan hampir keseluruhan pertumbuhan produk per kapita di negara maju. Syarat utama bagi pembangunan ekonomi ialah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpu

pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga negara itu sendiri. Pembangunan ekonomi pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi dan pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan.

Masalah kemiskinan tidak terlepas dengan permasalahan ketimpangan dan distribusi pendapatan. Ketimpangan diakibatkan struktur sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan. Ketimpangan ini pada gilirannya mengakibatkan kesenjangan pendapatan dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

Ukuran ketimpangan pendapatan menurut berdasarkan kriteria Bank Dunia dilihat dari besarnya persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan rendah. Bila kelompok ini menerima kurang dari 12% dari seluruh pendapatan, maka ketimpangan distribusi pendapatan dianggap tinggi. Namun bila kelompok ini menerima antara 12% sampai 17% dari seluruh pendapatan, maka tingkat ketimpangannya dianggap sedang, sementara bila kelompok ini menerima lebih dari 17% dari seluruh pendapatan, maka tingkat ketimpangannya dianggap rendah.

Dapat dikatakan bahwa kekayaan keseluruhan yang diproduksi oleh sebuah daerah, tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh

semua penduduknya. Kemiskinan yang semakin luas akan menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar.

Secara umum jumlah penduduk miskin tahun 2000 di Propinsi D.I Yogyakarta mengalami peningkatan contoh dari tahun 1999 sebesar 31,26 persen. Dalam tahun 1999 jumlah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 789,1 ribu jiwa, kemudian meningkat menjadi sekitar 1.035,8 ribu jiwa tahun 2000. Predikat daerah yang serba sulit masih melekat pada Kabupaten Gunungkidul, yang dengan batas kemiskinan sebesar Rp. 85.418 namun jumlah mereka yang masuk kategori miskin sebanyak 54,27 persen atau 362,3 ribu jiwa Kabupaten Sleman yang merupakan daerah yang lebih mapan dalam potensi ekonomi mempunyai batas kemiskinan sebesar Rp. 89.802 dengan demikian ada sekitar 198,1 ribu jiwa tergolong sebagai penduduk miskin atau 22,17 persen. Selanjutnya secara total propinsi maka tercatat garis kemiskinannya Rp.88.104 sehingga terdapat 1.038,5 ribu jiwa atau 33,38 persen penduduk adalah miskin.

TABEL 1.1.

**JUMLAH DAN PRESENTASE PENDUDUK MISKIN
MENURUT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 1999 DAN 2000**

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
	1999	2000	1999	2000	1999	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	84.062	84.205	125,7	145,7	35,17	39,36
Bantul	88.156	88.306	222,0	272,5	30,04	35,16
Gn Kidul	85.273	85.418	226,9	362,3	35,98	54,27
Sleman	89.650	89.802	158,6	198,1	18,49	22,17
Yogyakarta	91.891	92.047	55,9	57,3	12,76	14,45
Propinsi	88.035	88.104	789.1	1.035,8	26,11	33,38

Sumber: BPS Pusat, Data tahun 1999 hasil *Susenas Modul*, tahun 2000 *Susenas Kor*

Kesenjangan kemiskinan yang terjadi di daerah kota Yogyakarta tidak lebih baik dibandingkan wilayah yang lain. Secara rata-rata pendapatan penduduk miskin Propinsi D.I Yogyakarta berjarak 7,29 persen lebih buruk dibandingkan dengan garis kemiskinan propinsi. Beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin antara lain hilang/rusaknya sumber penghasilan penduduk, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, tingkat pendapatan secara rata-rata turun, kurang meratanya distribusi pendapatan, jumlah penduduk bertambah dan lain-lain. Dalam hal ini jelas pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta (dunia usaha dan masyarakat) mempunyai peranan besar dalam usaha menghilangkan/mengurangi kemiskinan di tanah air. Untuk maksud ini diperlukan suatu strategi, terdapat tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan prokemiskinan.
2. Pemerintahan yang baik.
3. Pembangunan sosial.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk menakar tingkat keberhasilan pembangunan. Sebagai tolok ukur dari pendapatan sebuah daerah atau wilayah dapat dilihat dari perkembangan ekonominya tetapi apakah pendapatan daerah tersebut dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan

yang cukup berarti, walaupun terdapat pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan akan tetapi hal ini menunjukkan gambaran hasil setiap tahun dalam melaksanakan program pembangunan. Tabel 1.2 memperlihatkan gambaran tentang tingkat perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu nilai tambah yang dihasilkan, struktur perekonomian dan laju pertumbuhan per kapita. Nilai tambah ini berasal dari jumlah faktor-faktor produksi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.

Faktor-faktor produksi tersebut dikelompokkan dalam sektor-sektor PDRB yaitu primer, sekunder, tersier. Disebut sektor primer bila outputnya masih tergantung pada alam seperti pertanian dan pertambangan. Sektor yang inputnya berasal dari sektor primer disebut sektor sekunder. Yang termasuk sektor sekunder ini adalah industri, listrik, jasa, gas dan air bersih, serta bangunan. Sektor-sektor lainnya, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor-sektor jasa dikelompokkan dalam sektor tersier

TABEL 1.2.
PDRB DAN PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 1987-2002

Tahun	PDRB (juta)	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	PDRB per kapita (Rupiah)
1987	916.847	2.836.852	3.094.159
1988	974.338	2.859.784	2.943.809
1989	1.018.866	2.881.990	2.828.625
1990	1.071.772	2.904.146	2.709.667
1991	1.146.109	2.915.950	2.544.216
1992	3.810.354	2.917.300	1.306.123
1993	4.119.318	2.918.100	1.411.643
1994	4.452.490	1.417.300	3.141.529
1995	4.799.589	1.418.750	3.382.970
1996	4.963.724	2.434.086	2.039.255
1997	4.485.633	3.429.546	1.307.937
1998	4.529.996	3.077.341	1.473.048
1999	4.711.463	3.099.441	1.520.100
2000	4.870.108	3.121.701	1.560.081
2001	5.065.776	3.144.120	1.611.190
2002	5.272.823	3.166.701	1.655.083

Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 2002 peranan ketiga kelompok sektor terhadap pembentukan PDRB DIY berbeda dibandingkan tahun 2001. Tahun 2001 peranan sektor primer tercatat sebesar 22,17% sedangkan pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi 20,82%. Sektor sekunder pada tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi sebesar 24,27%, dan pada tahun 2001 kontribusi sektor ini mencapai 24,19%.

Adapun kontribusi sektor tersier pada tahun 2002 sebesar 54,91% yang berarti mengalami kenaikan, jika dibandingkan pada tahun 2001 yang hanya memberikan kontribusi sebesar 53,64%. Sehingga dapat diperoleh total PDRB pada tahun 2001 sebesar 5.065.776 juta dan pada tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 5.272.823 juta. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di wilayah tersebut dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita, sedang besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Berdasarkan harga konstan 1993, PDRB per kapita DIY tahun 1998 tercatat sebesar Rp. 1.473.048 dan pada tahun 1999 mengalami kenaikan 0,27% menjadi Rp.1.520.100 Pada tahun 2001 PDRB per kapita juga mengalami kenaikan menjadi Rp.1.560.081 yang berarti naik 3,26% dibandingkan keadaan tahun 1999. Sedangkan pada tahun 2002 tercatat sebesar Rp.1.655.083, hal ini berarti menunjukkan peningkatan sebesar 2,55% jika dibandingkan tahun 2001.

Sebagai hasil dari pembagian ekonomi yang dilakukan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicerminkan dari tingkat konsumsi dan investasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat konsumsi dan investasi maka perlu dilihat PDRB menurut komponen penggunaan yang

didalamnya termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal, ekspor barang dan jasa, impor barang dan jasa, dan lain-lain.

TABEL 1.3.

**KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN INVESTASI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 1987-2002 (DALAM JUTAAN RUPIAH)**

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga	Investasi
1987	585.584	44.014
1988	587.436	171.520
1989	595.793	59.427
1990	607.792	589.207
1991	621.258	368.893
1992	628.673	144.867
1993	1.891.799	229.693
1994	1.965.848	368.896
1995	2.048.070	126.009
1996	2.155.913	191.257
1997	2.288.183	21.539
1998	2.211.831	5.986
1999	2.326.663	67.936
2000	2.401.267	119.891
2001	2.426.877	41.219
2002	2.452.871	6.998

Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DIY masih diwarnai oleh dominasi peranan konsumsi khususnya konsumsi rumah tangga. Dari tabel diatas bahwa tingkat konsumsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta naik dari tahun ke tahun dan terjadi kenaikan tajam tahun 1993 yang diakibatkan kenaikan daya beli masyarakat terhadap produk barang. Tingkat investasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, melambatnya perekonomian dunia dan masih tingginya suku bunga dalam negeri telah mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi. Bidang usaha yang diminati oleh investor adalah jasa wisata, jasa perdagangan ekspor impor, industri gas,

industri tekstil, industri plastik, industri makanan, industri pengolahan dan pengawetan daging serta restoran.

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara real, bukan karena adanya pengaruh harga.

Pada umumnya tujuan dari penghitungan besarnya PDRB suatu daerah adalah:

- (1) Agar terjadi pemerataan kegiatan pembangunan, baik sektoral maupun wilayah
- (2) Kebijakan investasi bisa diarahkan dengan tepat, artinya sektor dan wilayah mana yang diutamakan agar terjadi kemajuan ekonomi yang merata
- (3) Dengan adanya kegiatan pembangunan diharapkan tercipta lapangan kerja bagi masyarakat dan bertambahnya distribusi pendapatan yang akhirnya akan menaikkan taraf hidup masyarakat.

Dapat dijelaskan secara global bahwa pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sama saja artinya kalau pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk dalam suatu negara meningkat dalam jangka panjang atau dapat diartikan sebagai perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara yang dibarengi dengan perombakan dan modernisasi dan struktur ekonomi.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi juga tidak memandang terjadinya pembangunan struktur ekonomi. Jadi dengan kata lain pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi.²⁾

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana laju pertumbuhan ekonomi dengan indikator PDRB di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana pemerataan distribusi pendapatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dengan indikator PDRB di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui pemerataan distribusi pendapatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

²⁾ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, 1988, hlm. 15-17

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran kepada pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap masalah distribusi pendapatan.
2. Bagi penulis untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana, dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pemerataan distribusi pendapatan di Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta.
3. Dapat dijadikan bahan acuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari tujuh bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Merupakan gambaran mengenai keadaan geografis, demografi dan tinjauan umum mengenai daerah penelitian yaitu Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan rangkuman penelitian empiris yang pernah dilakukan.

BAB IV LANDASAN TEORI

Berisikan uraian mengenai hal apa saja yang mempengaruhi pemerataan distribusi pendapatan sesuai dengan teori yang ada dan definisi-definisi yang berkaitan sebagai landasan dasar dari penelitian.

BAB V METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan data, model dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil perhitungan dan sekaligus menganalisisnya dengan menggunakan analisis indeks gini dan kurva Lorenz.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisa penelitian yang telah penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1 Keadaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu propinsi dari 30 propinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah.

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.890.754 km²), yang terdiri dari:

- Kabupaten Kulon Progo dengan luas 586,27 km²
- Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km²
- Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.485,36 km²
- Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km²
- Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 km²

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 m - 499 m dari permukaan laut, tercatat sebesar 65,65 persen, ketinggian kurang dari 100 m sebesar 28,84 persen, ketinggian antara 500 - 999 m sebesar 5,04 persen dan ketinggian diatas 1000 m sebesar 0,47 persen. Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 6 - 949 mm yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan.³⁾

³⁾ Badan Pusat Statistik, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*, 2003

Secara administratif batas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: sebelah Timur dengan Kabupaten Wonogiri, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Magelang, yang semuanya adalah wilayah Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan di bagian Selatan dibatasi Lautan Indonesia.

Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Pegunungan Selatan, Gunung berapi Merapi, Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo, Pegunungan Kulonprogo dan Dataran Rendah Selatan.

2.1.1 Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil susenas tahun 2003, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 3.207.385 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk perempuan 50,26 persen dan penduduk laki-laki 49,74 persen. Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta 1.007 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.029 jiwa per km² dengan hanya sekitar 1 persen dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki luas wilayah mencapai 46,63 persen dihuni rata-rata 462 jiwa per km². Data mengenai jumlah penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1.
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN HASIL SUSENAS MENURUT
KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
PROPINSI D.I. YOGYAKARTA

Kelompok Umur	2002			2003		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	114.864	111.622	226.486	116.851	96.438	213.289
5 - 9	121.577	109.883	231.460	116.158	114.786	230.944
10 - 14	120.835	112.394	233.229	129.025	120.586	249.611
15 - 19	139.006	133.180	272.186	151.788	142.095	293.883
20 - 24	172.814	155.085	327.899	164.913	172.929	337.842
25 - 29	121.184	122.873	244.057	126.923	120.951	247.874
30 - 34	124.993	127.078	252.071	123.937	125.998	249.935
35 - 39	109.105	114.415	223.520	121.046	129.945	250.991
40 - 44	104.513	112.419	216.932	108.534	116.142	224.676
45 - 49	88.247	92.972	181.219	98.240	96.048	194.288
50 - 54	80.042	81.697	161.739	78.957	86.499	165.456
55 - 59	56.367	70.751	127.118	57.692	57.094	114.786
60 - 64	70.039	80.847	150.886	59.826	70.509	130.335
65 - 69	47.668	56.118	103.786	49.353	56.377	105.730
70 - 74	43.230	50.055	93.285	44.494	52.379	96.873
75 - 79	24.061	27.789	51.850	27.028	22.780	49.808
80 - 84	18.017	14.627	32.644	12.411	18.933	31.344
85 - 89	7.137	7.023	14.160	4.869	5.112	9.981
90 - 94	2.816	4.015	6.831	1.741	3.310	5.051
95+	1.581	3.290	4.871	1.397	3.291	4.688
Tidak tahu	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.568.09	1.588.13	3.156.23	1.595.18	1.612.2	3.207.38

Sumber: Susenas, BPS Propinsi D.I Yogyakarta

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Propinsi DIY pada tahun 2003 didukung oleh 90.441 orang pegawai negeri sipil. Ditinjau menurut level pemerintahan, pegawai pemerintahan terbesar pada 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambaran tenaga kerja di sektor swasta berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mencatat jumlah pendaftaran pencari kerja pada tahun 2003 sebanyak 94.881 orang, menurun sekitar 11,26 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 106.923 orang. Mereka terdiri dari 52,17 persen laki-laki dan 47,83 persen perempuan. Dari jumlah tersebut 58,42 persen berpendidikan SLTA, 34,95 persen Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana, serta 5,46 persen adalah SLTP. Persentase lowongan pekerjaan yang tersedia dan penempatan masing-masing adalah 14,01 persen dan 12,37 persen dari total pendaftar/pencari kerja.

TABEL 2.2.

**JUMLAH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PENCARI PEKERJAAN,
LOWONGAN DAN PENEMPATANNYA DI PROPINSI
D.I.YOGYAKARTA**

Tahun	Pendaftaran			Penempatan/Penghapusan			Sisa pendaftaran Akhir tahun ini	Lowongan tahun ini
	Akhir tahun lalu	Tahun ini	Jumlah	Penempatan	Penghapusan	Jumlah		
1994	137.465	42.485	179.950	7.778	63.446	71.224	108.726	7.929
1995	108.726	36.197	144.923	7.645	41.283	48.928	95.995	8.468
1996	95.995	44.059	140.054	9.005	82.623	91.628	48.426	10.124
1997	48.426	38.695	87.121	7.541	32.752	40.293	46.828	9.120
1998	46.828	38.467	85.295	7.109	27.895	35.004	50.291	9.220
1999	50.291	37.909	88.200	8.089	32.081	40.170	48.030	8.572
2000	48.030	27.803	75.833	5.553	15.185	20.738	55.095	5.767
2001	55.095	28.487	83.582	4.624	10.177	14.801	68.781	4.928
2002	68.781	38.142	106.923	9.662	42.230	51.892	55.031	10.656
2003	55.031	39.850	94.881	11.741	23.620	35.361	59.520	13.288

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi D.I. Yogyakarta

2.1.2 Tingkat Pendidikan

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2003 memiliki 2.228 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 308.808 anak dan diasuh oleh 20.002 guru. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SLTP tercatat sebanyak 511 sekolah dengan 143.003 anak didik yang diasuh oleh 14.120 orang guru.

TABEL 2.3.

**JUMLAH SEKOLAH, KELAS, MURID DAN GURU SMU MENURUT
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 1999/2000 - 2003/2004**

Kabupaten/ Kota	Sekolah	Kelas	Murid	Guru	Rata-rata per Sekolah	
					Murid	Guru
1.Kulonprogo	18	176	5.909	599	575	61
2.Bantul	39	408	13.822	1.340	720	69
3.Gn.Kidul	29	221	7.393	847	572	62
4.Sleman	51	457	14.780	1.291	684	54
5.Yogyakarta	50	628	22.287	2.918	1.094	145
Propinsi DIY	188	1.890	64.191	6.995	765	79
2002/2003	190	1.930	66.704	6.134	783	69
2001/2002	192	1.980	68.586	6.793	790	72
2000/2001	193	1.960	71.051	6.032	816	65
1999/2001	196	2.000	72.036	6.238	813	66

Sumber: Data diolah, Dinas Pendidikan Propinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas untuk jenjang Sekolah Menengah Umum, tercatat sebanyak 6.995 orang guru yang mengajar 64.191 siswa yang tersebar pada 188 sekolah. Adapun untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 147 unit sekolah dengan 59.598 siswa yang diajar oleh 6.260 orang guru.

2.1.3 Pertanian

2.1.3.1 Tanaman Pangan

Tanaman pangan meliputi komoditas padi, palawija serta hortikultura. Pada tahun 2003, produksi padi tercatat sebesar 652.280 ton (mengalami penurunan sebesar 0,20 persen dari tahun 2002). Produksi palawija didominasi oleh komoditas ketela pohon sebesar 764.409 ton, kemudian jagung sebesar 204.129 ton serta kacang tanah dan kacang kedelai masing-masing 57.767 ton dan 35.562 ton. Adapun ketela rambat dan kacang hijau relatif kecil, masing-masing 7.578 ton dan 563 ton. Salak merupakan komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan oleh petani di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2003, produksi komoditas tersebut sebesar 31.046,1 ton atau mengalami penurunan sebesar 57,41 persen dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 72.901,1 ton (angka diperbaiki).

TABEL 2.4.

**LUAS PANEN TANAMANA BAHAN TANAMAN MENURUT
JENISNYA DAN KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA**

Jenis Tanaman	Kabupaten/Kota					Propinsi DIY
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta	
1. Padi sawah	19.158	22.728	10.328	42.253	162	94.629
2. Padi Ladang	17	273	35.366	396	-	36.052
3. Jagung	4.107	5.178	51.216	4.541	20	65.062
4. Ketela Pohon	2.814	2.973	52.500	983	-	59.270
5. Ketela Rambat	35	46	192	425	1	699
6. Kacang Tanah	1.601	5.739	57.107	5.323	33	69.803
7. Kacang Kedelai	2.140	4.190	29.446	550	1	36.327
8. Kacang Hijau	95	105	656	20	-	876
9. Cantel	2	1	1.150	-	-	1.153

Sumber: Dinas Pertanian Kab./Kota Propinsi D.I. Yogyakarta

2.1.3.2 Perkebunan

Tanaman perkebunan yang cukup potensial di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kelapa dan tebu. Pada tahun ini produksi masing-masing komoditas mencapai 47.532 ton dan 13.992 ton. Angka ini mengalami kenaikan produksi

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,55 persen dan 2,39 persen.

2.1.3.3 Kehutanan

Kawasan hutan terkonsentrasi di kabupaten Gunung Kidul seluas 77,60 persen dari keseluruhan 17,05 ribu ha. Nilai produksi hutan pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp 3.037 juta, meningkat sekitar 18,07 persen dibandingkan dengan tahun 2002 yang sebesar Rp 2.573 juta.

2.1.3.4 Peternakan

Populasi ternak di D.I. Yogyakarta tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 3,20 persen dari 586.367 ekor pada tahun 2002 menjadi 567.591 ekor pada tahun 2003. Jenis ternak yang dominan adalah kambing, sapi dan domba masing-masing sebesar 42,46 persen, 39,51 persen dan 13,95 persen pada tahun 2003.

2.1.3.5 Perikanan

Data perikanan tahun 2003 di Propinsi D.I. Yogyakarta mencatat bahwa produksi perikanan mencapai 8.376,1 ton atau naik sebesar 7,57 persen dibandingkan dengan tahun 2002 yang tercatat sebesar 7.786,8 ton. Sekitar 78,81 persen dari total produksi perikanan merupakan hasil budidaya perikanan darat dan selebihnya 21,19 adalah hasil perikanan laut.

2.1.4 Perdagangan

Ketersediaan bahan pokok strategis seperti beras memperoleh perhatian Pemerintah dalam hal pengadaan dan distribusi guna mengendalikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Pada tahun 2003, persediaan beras mencapai 57.717,64 ton atau turun 11,95 persen dari tahun 2002 dan disalurkan sebesar 44.405,60 ton (76,94 persen).

Peningkatan nilai ekspor empat tahun terakhir ini mengisyaratkan mulai membaiknya perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta akibat krisis ekonomi pada tahun 1997. Nilai ekspor daerah ini tahun 2003 mencapai US\$ 115,318 juta, naik sebesar 4,7 persen dari tahun 2002 yang sebesar US\$ 110,140 juta.

2.1.5 Perkembangan Prasarana Panjang Jalan

Jalan raya beraspal merupakan sarana utama lalu lintas yang sangat diperlukan untuk transportasi dan kelancaran roda perekonomian, maka kondisi dan penggunaannya harus diperhatikan. Panjang jalan negara sekitar 3,13 persen, panjang jalan propinsi 13,65 persen dan panjang jalan kabupaten mencapai 83,22 persen. Di lihat menurut kondisi jalan, sekitar 42,50 persen dalam kondisi baik, 36,50 persen dalam kondisi sedang dan sekitar 21,00 persen dalam kondisi rusak dan rusak berat yang sebagian besar terjadi pada jalan-jalan kabupaten.

2.1.6 Kondisi Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan bagi D.I. Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan daerah. Indikator yang dapat menunjukkan aktivitas kepariwisataan antara lain dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan serta rata-rata lama menginap para wisatawan selama berkunjung di Yogyakarta.

Pada tahun 2003 di D.I. Yogyakarta tersedia 37 hotel bintang dengan 3.393 kamar dan 5.664 tempat tidur, serta 1.006 hotel melati dengan 10.467 kamar dan 16.337 tempat tidur.

Tamu asing yang berkunjung ke Yogyakarta menginap rata-rata selama 3,81 hari, lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya yang selama 3,49 hari. Adapun tamu domestik rata-rata menginap selama 1,79 hari, lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya yang selama 1,75 hari.

2.1.7 Keadaan Perekonomian

Gambaran ekonomi berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian Propinsi D.I. Yogyakarta dalam tahun 2003 tumbuh sekitar 4,09 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,02 persen (angka diperbaiki). Berikut ini tabel mengenai pertumbuhan sektor PDRB Propinsi D.I Yogyakarta atas dasar harga konstan tahun 2001 - 2003.

TABEL 2.5.

**PERTUMBUHAN SEKTOR PDRB PROPINSI D.I YOGYAKARTA
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN
TAHUN 2001 – 2003**

Lapangan Usaha	Tahun		
	2001	2002	2003
1. Pertanian	17,37	16,05	16,17
2. Pertambangan dan Penggalian	1,19	1,13	1,10
3. Industri Pengolahan	13,22	13,06	12,84
4. Listrik, Gas dan air Bersih	0,76	0,75	0,76
5. Bangunan	6,84	8,43	8,94
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,53	16,14	16,40
7. Pengangkutan dan Komunikasi	13,13	13,10	12,88
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10,61	11,19	11,29
9. Jasa-jasa	20,35	20,14	19,63
PDRB	4,01	4,02	4,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi D.I Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perekonomian D.I. Yogyakarta tahun 2003 adalah mengalami pertumbuhan positif dari seluruh sektor. Sektor Bangunan tetap mengalami pertumbuhan paling besar yaitu sebesar 10,32 persen. Disusul dengan sektor Perdagangan dan sektor Listrik, Gas, Air Minum masing-masing sebesar 5,73 persen. Sedangkan sektor Pertanian yang sebelumnya tumbuh negatif, pada tahun ini mampu tumbuh sebesar 4,85 persen.

Pertumbuhan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan tercatat sebesar 4,98 persen. Sebagai daerah yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan jasa, kondisi ini memperlihatkan masih dinamisnya aktivitas ekonomi. selain sektor-sektor di atas, sektor Industri, Pengolahan dan Sektor Angkutan dan Komunikasi juga berperan positif meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing tumbuh sebesar 2,38 persen dan 2,33 persen.

Meski andil sektor Industri masih lebih kecil dari sektor Pertanian ataupun sektor jasa-jasa, namun sektor Industri tetap merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang potensial karena sifat industri yang mampu mendorong pembentukan nilai tambah yang tinggi.

Berdasarkan tabel 2.6, nilai PDRB atas harga berlaku Propinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp 18.8383.844 juta dengan PDRB per kapita sebesar Rp 5.096.623 atau naik 11,92 persen. Berdasarkan komposisi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dapat diketahui bahwa peran sektor Pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian Propinsi D.I Yogyakarta mulai tergeser oleh sektor lain.

TABEL 2.6.

**PDRB PROPINSI D.I YOGYAKARTA MENURUT LAPANGAN USAHA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2001 - 2003**

Lapangan Usaha	Tahun		
	2001	2002	2003
1. Pertanian	2.915.337	2.988.317	3.116.536
2. Pertambangan dan Penggalian	205.643	239.597	266.260
3. Industri Pengolahan	2.400.304	2.574.808	2.723.338
4. Listrik, Gas dan air Bersih	121.077	158.793	174.022
5. Bangunan	1.038.828	1.219.347	1.590.232
6. Perdagangan, Hotel dan Restauran	2.761.868	3.087.572	3.637.532
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1.508.965	1.845.528	1.973.371
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.216.685	1.715.998	2.065.870
9. Jasa-jasa	2.584.324	2.988.317	3.291.656
PDRB	4.692.261	5.277.697	5.906.623

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi D.I Yogyakarta

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu atau kajian pustaka mengenai Pemerataan dan Ketimpangan Pendapatan yang menjadi topik penelitian penulis. Para pengamat ekonomi banyak yang menaruh perhatian pada permasalahan pembagian distribusi pendapatan, seperti diawali oleh Sundrum (1973) serta King dan Weldon (1975). Dalam waktu relatif singkat bermunculan para ahli ekonomi yang melakukan penelitian seperti Hendra Esmara (1974 dan 1978) kemudian Parera (1977). Tetapi sebagian besar hanya bertujuan mengetahui gambaran ketimpangan dalam pembagian pendapatan, yang biasanya dinyatakan dalam ukuran Gini Ratio. Sedangkan pengukuran jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka masih jarang dilakukan.⁴⁾

Selama ini di banyak negara berkembang dalam kebijaksanaan politik dan ekonominya lebih menekankan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam upaya tercapainya kemakmuran bagi penduduknya. Terdapat dua pilihan antara memperbesar kue terlebih dahulu, baru kemudian dibagi merata atau dilakukan pembagian secara merata terlebih dahulu berapapun besar kue yang didapat. Namun terlepas dari polemik dikotomi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih berarti jika terjadi pemerataan hasilnya yang dapat dinikmati masyarakat luas.

⁴⁾ *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemerataan Pendapatan Penduduk Propinsi DIY*, BPS, 2000

Berdasarkan penelitian, Hendra Esmara memperkirakan bahwa 40 persen penduduk Indonesia yang berpendapatan rendah menerima 19,5 persen dari pendapatan nasional yang berarti bahwa menurut Kriteria Bank Dunia tingkat ketimpangan pembagian pendapatan di Indonesia ketika itu tergolong rendah. Begitu pula jika dilihat dari Gini Ratio hasil estimasi Hendra Esmara yang cenderung pada kesimpulan serupa.⁵⁾ Ahluwalia dalam analisisnya memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan relatif maupun distribusi pendapatan mutlak. Yang dimaksudkan distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan penggolongan penerima pendapatan dan penggolongan ini didasarkan pada besarnya pendapatan yang mereka terima. Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk dan pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang daripadanya.⁶⁾

Hasil penelitian Ulyy Adriyani mengenai pemerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Temanggung diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus indeks gini, dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Temanggung nilainya selalu kurang dari 0,35 yang menunjukkan bahwa kesenjangan yang terjadi antar golongan pendapatan relatif rendah.⁷⁾ Terdapat berbagai ukuran tentang tingkat pemerataan yang

⁵⁾ Hinu Rimawan, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pemerataan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Pemasang*, Skripsi S-1 Fak. Ekonomi, UNDIP, Non Publikasi, Semarang, 1999

⁶⁾ Montek S. Ahluwalia, *Penelitian Tentang Distribusi Pendapatan*, BPS, 1974

⁷⁾ Ulyy Adriyani, *Tingkat Pemerataan Distribusi Pendapatan Kabupaten Temanggung*, Skripsi S-1 Fak. Ekonomi, UII, Non Publikasi, Yogyakarta, 2001

terjadi pada golongan masyarakat yaitu ukuran Gini Ratio, Kuznet's Index, Oshima's Index dan Theil Decomposition. Selanjutnya pemakaian Gini Ratio (GR) lebih populer digunakan. Ratio Gini ini mempunyai besaran antara 0 sampai dengan 1. Gambaran terjadi pemerataan yang sempurna divisualkan oleh angka $GR=0$ kebalikannya apabila $GR=1$ akan terjadi ketimpangan pada golongan penduduk yang mutlak sangat timpang. Besaran $GR=0$ dan $GR=1$ hanya ada dalam teori, dalam kondisi aktual hampir tidak pernah terjadi. Untuk negara berkembang distribusi pendapatan dalam keadaan timpang jika gini ratio berada di antara angka 0,5 sampai 0,7. Sedangkan menurut Oshima menggolongkan tingkat ketimpangan menjadi tiga kategori, yakni apabila $GR < 0,3$ berarti ketimpangan rendah, GR antara 0,3 sampai dengan 0,4 ketimpangan sedang dan lebih besar 0,4 merupakan ketimpangan tinggi.

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1 Teori Pertumbuhan

Secara singkat pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan dalam jangka panjang, dari pernyataan tersebut kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita dimana terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (*Gross Domestic Product*) dan sisi jumlah penduduknya.

Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, ada tiga aspek penekanan yaitu: proses output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi suatu proses dan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Dalam hal ini melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, yang menekankan pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output per kapita, sehingga ada dua aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output per kapita adalah output total yang dibagi dengan jumlah penduduk.⁸⁾

⁸⁾ Boediyono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1985. hal 1-3

Aspek ketiga dari definisi pertumbuhan diatas adalah perspektif waktu jangka panjang, kenaikan output perkapita selama 1 atau 2 tahun, yang kemudian diikuti oleh penurunan output perkapita, bukan merupakan pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian. Dikatakan tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama (10 tahun atau lebih) mengalami kenaikan output per kapita.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, harus dibandingkan dengan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan, jadi perubahan dari nilai pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat ekonomi.⁹⁾

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami suatu pertumbuhan atau berkembang, apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada apa yang dicapai oleh masa dari sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangan baru tercipta apabila jumlah fisik barang dan jasa-jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya.

4.2 Distribusi Pendapatan

Gambaran permasalahan produksi dalam suatu daerah atau negara dibedakan menjadi dua kelompok barang yaitu pertama barang kebutuhan pokok seperti makanan pokok, sandang dan perumahan sederhana, kedua barang mewah seperti tv, mobil dan barang konsumsi mewah lainnya.

⁹⁾ Sadono Sukirno, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1985, hlm. 4-5

Dengan anggapan bahwa semua faktor produksi telah dimanfaatkan secara penuh, maka permasalahannya adalah bagaimana masyarakat menentukan pilihannya.

Dua negara atau daerah dengan pendapatan per kapita yang sama mungkin akan berbeda dalam pola produksi dan pola konsumsinya. Mereka mungkin berada pada titik yang berbeda dengan kurva kemungkinan produksi, tergantung pada tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Bagi negara atau daerah yang pendapatan per kapitanya rendah, semakin tidak merata distribusi pendapatan semakin berpengaruh preferensi konsumsi golongan kaya terhadap pola produksi dan permintaan agregat. Walaupun kenyataan golongan kaya hanya merupakan kelompok kecil dalam masyarakat, namun dengan kekuatan daya belinya mereka mampu mempengaruhi pola produksi sehingga mengarah ke barang mewah. Tingkat distribusi lebih merata pola permintaan akan lebih mendorong produksi bahan makanan pokok lain yang selanjutnya dapat mengurangi kemiskinan akan menaikkan tingkat hidup masyarakat. Dari berbagai studi ditemukan bahwa:¹⁰⁾

1. Distribusi pendapatan lebih tidak merata di negara sedang berkembang daripada di negara maju.
2. Trend distribusi pendapatan akan semakin merata, semakin maju perekonomian.

¹⁰⁾ Irawan dan Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*. BPFE, Yogyakarta, hlm. 197

3. Negara yang berpenghasilan per kapita \$500 ke atas distribusi pendapatannya semakin merata. Koefisien Gini di negara sedang berkembang rata-rata 0,467, sedangkan di negara maju 0,392.
4. Perkembangan di negara sedang berkembang banyak menguntungkan golongan kecil saja (20%) terkaya.
5. Ada dua pengertian: pendapatan absolut dan pendapatan relatif. Di negara yang miskin; golongan yang termiskin pasti miskin sekali, sedangkan di negara yang maju yang termiskin mungkin masih lebih kaya dari golongan yang menengah di negara miskin.

Mengenai keadaan distribusi pendapatan, *Ahluwalia* dalam analisisnya memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan relatif maupun distribusi pendapatan mutlak. Yang dimaksudkan distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan penggolongan penerima pendapatan. Penggolongan ini didasarkan pada besarnya pendapatan yang mereka terima. Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi pendapatan mutlak adalah presentase jumlah penduduk dan pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang daripadanya.

Untuk menggambarkan distribusi pendapatan relatif di berbagai negara *Ahluwalia* menggolongkan penerima pendapatan dalam tiga golongan:¹¹⁾

1. 40% penduduk yang menerima pendapatan paling rendah.

¹¹⁾ Montek S. Ahluwalia, *op.cit.*, hlm.20

2. 40% penduduk berpendapatan menengah.
3. 20% penduduk berpendapatan paling tinggi.

Sedangkan keadaan distribusi pendapatan mutlak di berbagai negara ditunjukkan dengan melihat jumlah penduduk yang menerima pendapatan di bawah garis kemiskinan (*Poverty Line*). Dalam hal ini dia menentukan pendapatan sebesar US\$ 50 dan US\$ 75 sebagai garis kemiskinan.¹²⁾ Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari susenas. Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat.

4.3 Menggabungkan Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Perumusan kembali indeks-indeks pembangunan ekonomi yang memperhitungkan alternatif nilai-nilai sosial bagi kelompok-kelompok pendapatan yang berlain-lainan membantu kita untuk dapat lebih memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Di satu pihak, penggunaan indeks-indeks demikian itu telah menggarisbawahi pentingnya memusatkan perhatian pada perbaikan langsung taraf kehidupan kelompok-kelompok yang berpenghasilan rendah ketimbang hanya mengkhawatirkan terjadinya konflik-konflik yang belum tentu ada antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Di pihak lain, pengakuan bahwa pembangunan riil perlu memerangi secara langsung sumber-sumber kemiskinan tidak akan menghasilkan apapun kalau tidak disertai dengan

¹²⁾ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke 3*, Jilid I, Erlangga, 1998.

pemahaman mengenai apa yang akan menentukan tingkat-tingkat pendapatan dan tingkat pertumbuhan pada kelompok pendapatan yang berbeda-beda itu.

Perlu diketahui bagaimana faktor-faktor produksi yang menghasilkan pendapatan akan didistribusikan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Misalnya, bahwa pendapatan seseorang tidak hanya terdiri atas pendapatan yang diperoleh dari sediaan tenaga kerja, tetapi juga dari kelompok-kelompok yang berpenghasilan tinggi, dari pemilikan individu atas kekayaan lain seperti misalnya tanah dan modal (baik fisik maupun finansial). Ketika menganalisis faktor-faktor penentu riil dari distribusi pendapatan yang sangat tidak merata, maka akan tampak bahwa hal itu merupakan distribusi yang sangat tidak merata dalam pemilikan aset produktif seperti misalnya tanah dan modal di kalangan penduduk negara-negara Dunia Ketiga sehingga menimbulkan perbedaan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin.

Setiap usaha untuk memperbaiki taraf kehidupan kelompok miskin jelas harus ditujukan tidak hanya pada usaha meningkatkan keuntungan-keuntungan ekonomis dari faktor-faktor yang mereka miliki secara terbatas itu (yaitu meningkatkan keuntungan-keuntungan ekonomis tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas), tetapi juga melakukan perubahan-perubahan drastis pola-pola pemusatan modal baik fisik maupun manusia kepada kelompok-kelompok yang berpenghasilan rendah.¹³⁾

¹³⁾ M. P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.

Teori Kaldor

Kaldor dan para pendukung Keynes lain menetapkan anggapan dasar bahwa tingkat investasi itu ditentukan secara eksogen dan para pekerja maupun kapitalis mempunyai kecenderungan menabung yang berbeda. Agar tabungan sama besar dengan investasi, pendapatan total harus didistribusikan di antara pekerja dan kapitalis menurut proporsi tertentu. Oleh karena itu dalam model ini perubahan distribusi pendapatan fungsional adalah mekanisme yang menyeimbangkan, tabungan menentukan besar kecil investasi, sedang kenaikan investasi dalam model neo-Keynes harus mengarah pada peningkatan laba, karena kecenderungan untuk menabung yang berasal dari laba lebih tinggi daripada kecenderungan untuk menabung yang berasal dari upah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam distribusi pendapatan tergantung pada tingkat pertumbuhan perekonomian.¹⁴⁾ Ini berarti bahwa semakin tidak merata pola distribusi pendapatan semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi. Dan seandainya laju pertumbuhan GDP adalah satu-satunya tujuan masyarakat, maka strategi yang terbaik adalah membuat pola distribusi pendapatan setimpang mungkin.

Model kaldor menunjukkan kepada adanya *trade off* atau pilihan antara pertumbuhan GDP yang cepat tetapi dengan distribusi pendapatan yang timpang atau pertumbuhan GDP yang lambat tetapi dengan pertumbuhan distribusi pendapatan yang lebih merata. Sekaligus model

¹⁴⁾ Norman Gemmill, *Ilmu Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1992, hlm. 112

tersebut memberi peringatan bahwa laju pertumbuhan GDP seharusnya tidak dijadikan satu-satunya tujuan atau tujuan yang diletakkan jauh diatas tujuan-tujuan lain.

Hasil-hasil pengujian empiris dari sejumlah studi yang ada, misalnya dari Alesina dan Rodrik (1994), Perotti (1992, 1993, 1993, 1996) menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan mempengaruhi laju pertumbuhan. Landasan teorinya adalah sebagai berikut: distribusi kekayaan atau pendapatan yang timpang berpengaruh terhadap jumlah investasi dalam fisik atau manusia (*human capital*), yang selanjutnya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ini artinya distribusi pendapatan yang merata merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan: semakin rata pembagian pendapatan semakin tinggi laju pertumbuhan dan sebaliknya.¹⁵⁾

Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pertama distribusi pendapatan perorangan, kedua distribusi pendapatan fungsional.

4.4 Distribusi Pendapatan Perorangan

Distribusi pendapatan perorangan menyatakan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga. Dalam konsepsi ini tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga. Untuk memperoleh pendapatan dan banyaknya anggota rumah tangga yang mencari penghasilan rumah tangga, apakah penghasilan

¹⁵⁾ Tulus T.H. Tambunan, *op.cit.* hlm. 89.

tersebut dari bekerja atau dari sumber lain seperti bunga, laba atau warisan. Selanjutnya tempat dan sektor sumber pendapatan diabaikan pula.

Pada sisi penawaran pasar pemilik faktor produksi akan menawarkan jasa pada tingkat harga tertentu. Rumah tangga atau pemilik faktor produksi akan menawarkan jasa pada tingkat harga tertentu. Rumah tangga atau pemilik faktor produksi akan memberikannya apabila imbalannya cukup layak. Kedua, pengkonsentrasian pada sisi permintaan terhadap tenaga kerja sebagai bagian dari faktor produksi. Pada sisi permintaan faktor produksi akan membeli pada tingkat harga yang sesuai dengan produktifitasnya. Semakin tinggi produktifitas semakin tinggi pula kesediaan untuk membayar.

Ketiga, sebagai bagian dari pertama dan kedua melihat distribusi pendapatan sebagai gabungan dari sisi penawaran dan permintaan yang sebagian besar menyangkut aspek tenaga kerja. Pada situasi ini akan berlaku hukum penawaran dan permintaan. Apabila input yang ditawarkan lebih sedikit sedangkan permintaan besar maka akan mengakibatkan harga naik, sebaliknya apabila input yang ditawarkan banyak sedangkan permintaan sedikit maka harga akan turun.

4.5 Distribusi Pendapatan Fungsional

Distribusi pendapatan fungsional mencoba untuk menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh masing-masing faktor. Faktor-faktor tersebut terdiri dari tanah (SDA), tenaga kerja dan modal. Pendapatan

didistribusikan sesuai dengan fungsinya seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa dan pemilik modal menerima bunga atau laba.

Distribusi pendapatan yang didasarkan kepemilikan faktor produksi ini akan berkaitan erat dengan proses pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, pendapatan yang diterima sebagai hasil kerja yang berupa upah atau gaji dan besarnya upah atau gaji tergantung dari produktifitas pekerja. Kedua, yaitu pendapatan dari sumber-sumber lain seperti, sewa, laba, bunga, hadiah maupun warisan.

4.6 Akibat Dari Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan

Akibat yang nyata dari ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah adanya kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya bisa diamati sebagai koreksi masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik kemampuan pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan. Ketidakikutsertaan ini bisa terjadi secara alamiah atau belum mampu mendayagunakan faktor produksinya dan dapat pula secara tidak alamiah.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan karena sosial kemasyarakatan yang ada menyebabkan kelompok masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Sementara itu sebagian masyarakat

yang lain dengan relatif mudah bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga ia masuk dalam proses pembangunan dan pada akhirnya mereka mendapatkan sejumlah pendapatan. Kemiskinan sebagai suatu gejala sosial atau kultural lebih banyak berkaitan dengan sikap hidup penduduk miskin yang tidak mempunyai keinginan untuk maju dan berusaha untuk memperbaiki taraf hidupnya. Sedangkan kemiskinan ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi di sekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan miskin pendapatan.

Konsep kemiskinan pada dasarnya berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan-kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga itu dikatakan miskin. Dengan kata lain kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum yang merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin yang sering disebut dengan garis kemiskinan.

Konsep ini disebut dengan kemiskinan mutlak atau kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, pemukiman sandang, kesehatan dan pendidikan. Besarnya masalah kemiskinan absolut tercermin dari jumlah

penduduk yang tinggi atau konsumsinya berada di tingkat minimum yang telah ditetapkan.¹⁶⁾

Jika jumlah pendapatan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum maka seseorang tersebut dikatakan miskin. Sedangkan yang dikenal dengan kemiskinan relatif adalah walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih kecil jika dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Kemiskinan relatif berkaitan dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural yaitu kebijaksanaan yang belum seimbang yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

4.7 Teori Tentang Pemerataan Distribusi Pendapatan

Hasil pemerataan diukur dari distribusi pendapatan yang berturut dari pendapatan terendah sampai pendapatan masyarakat yang paling kaya. Terdapat berbagai ukuran tentang tingkat pemerataan yang terjadi pada golongan masyarakat (penduduk) yaitu ukuran Gini Ratio (GR) lebih populer digunakan, Rasio Gini mempunyai besar antara 0 sampai dengan 1. Gambaran terjadi pemerataan yang sempurna divisualkan oleh angka $GR = 0$ kebalikannya apabila $GR = 1$ akan terjadi ketimpangan pada golongan penduduk yang mutlak sangat timpang.

Ukuran Gini Ratio dapat diperoleh dari "*plotting*" ke dalam susunan salib sumbu. Sumbu mendatar (sumbu x) merupakan persentase jumlah

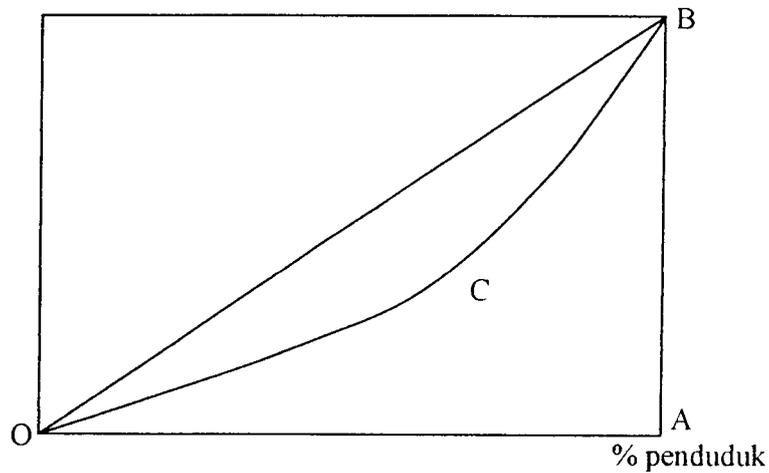
¹⁶⁾ Montek S. Ahluwalia, *op.cit.* hlm. 26

penduduk dari penduduk lapisan bawah sampai tinggi. Sumbu tegak (sumbu y) adalah persentase tingkat pendapatan. Garis diagonal dengan sudut 45 derajat, membagi luas bujur sangkar menjadi dua bagian yang sama besar yang sekaligus bermakna kumulatif persentase jumlah penduduk menerima bagian yang sama dengan kumulatif pendapatan keseluruhan.

Misalkan 50% penduduk menerima 40% pendapatan keseluruhan, yang berarti terjadi pemerataan mutlak. Dalam bidang bujur sangkar terdapat suatu kurva lengkung yang terbentuk dari perpotongan tingkat pendapatan (sumbu y) dengan jumlah penduduk yang menerima pendapatan (sumbu x) secara kumulatif. Kurva ini dikenal dengan kurva Lorenz. Jika kurva mendekati garis diagonal maka berarti distribusi pendapatan makin merata. Gini Ratio sendiri merupakan perbandingan luas di bawah garis diagonal dengan kurva terhadap luas segitiga.¹⁷⁾

Indeks Gini yang lebih besar dari 0,5 dianggap sebagai ukuran bagi kesenjangan pemerataan yang tinggi. Kesenjangan yang moderat dicerminkan bila gini diperoleh berkisar antara 0,4 dan 0,5. Sedangkan indeks gini yang lebih kecil dari 0,4 dianggap sebagai ukuran dari kesenjangan pemerataan yang lebih kecil.

¹⁷⁾ *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemerataan Penduduk Propinsi DIY*, op.cit, hlm. 26



**GAMBAR 4.1
KURVA LORENZ**

Keterangan :

$$\text{Gini Ratio} = \frac{\text{Luas } OCB}{\text{Luas } OAB}$$

Kurva Lorenz = OCB

Bila pembangunan sebuah bangsa diukur dengan PNP/kapita dan tingkat ketimpangan bagian pendapatannya, maka akan mendapatkan gambaran yang lebih majemuk. Tidak semua negara yang berhasil meningkatkan PNB/kapitanya, berhasil juga dalam meratakan hasil-hasil pembangunannya. Demikian juga tidak semua negara yang masih rendah PNB/kapitanya menunjukkan ketimpangan yang tinggi dalam hal pemerataan. Dengan demikian dapat dikatakan bagi negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang disamping tinggi produktifitasnya, penduduknya juga makmur dan kesejahteraannya relatif merata.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data runtun waktu antara tahun 1987 - 2001. Sumber data untuk penelitian ini adalah dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam tulisan ini penulis juga menggunakan data pendukung yang diantaranya adalah data dari hasil survey biaya hidup, data dari sensus penduduk dilihat dari tinjauan indikator ekonomi, indikator kesejahteraan rakyat dan lain-lain.

5.2 Variabel-variabel yang Digunakan

5.2.1 Angka Gini Koefisien (GC)

Angka Gini Koefisien dapat dihitung dengan suatu rumus tersendiri dalam susunan tabel frekuensi distribusi pendapatan dan jumlah penduduk. Hitungan ini akan menghasilkan besaran angka yang mempunyai makna tertentu tentang tingkat pemerataan.¹⁸⁾

5.2.2 Jumlah Kelas (K)

Jumlah kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang dibagi menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40

¹⁸⁾ Ibid, hlm. 23

persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

5.2.3 Proporsi Jumlah Masyarakat dalam Kelas i (fi)

Persentase jumlah masyarakat dalam kelas i. Kelas i dapat dibagi menjadi lima atau tiga kelas. Dalam penelitian ini dipakai dalam tiga kelas, yaitu: 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (miskin), 40 persen penduduk berpenghasilan menengah dan 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi (kaya).¹⁹⁾

5.2.4 Proporsi secara Kumulatif dari Jumlah Pendapatan Masyarakat sampai Kelas ke-i

Persentase jumlah pendapatan masyarakat sampai kelas ke-i yang dihitung dari setiap kelas berdasarkan susunan tabel frekuensi distribusi pendapatan.

5.3 Metode Analisis Data

5.3.1 Metode Kualitatif

Yaitu metode yang didasarkan pada analisa variabel-variabel yang tidak dapat diukur atau menggunakan analisis yang sifatnya menguraikan dalam bentuk kata-kata. Jadi dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi dengan indikator PDRB Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁹⁾ *Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan*, BPS, Yogyakarta, 2000, hlm.4

5.3.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu metode analisis data yang menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka dengan menggunakan rumus-rumus dan teknik perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang sedang diteliti.

5.3.3 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan dalam penelitian ini menggunakan indeks gini dan kurva Lorenz.

5.3.4 Indeks Gini dan Kurva Lorenz

Koefisien gini menghitung rasio area antara garis diagonal dengan kurva Lorenz, dibandingkan dengan jumlah area setengah atau separuh dimana tempat kurva itu. Contoh dalam gambar 2 adalah rasio area E, dibandingkan dengan jumlah area dari segitiga ABC.²⁰⁾

$$\text{Koefisien Gini} = \frac{\text{Area A}}{\text{Jumlah area BCD}}$$

Atau bentuk persamaan matematisnya sebagai berikut:

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^k f_i (Y^*_{i-1} - Y^*_{i-1})$$

Dimana:

GC = Angka Gini Koefisien

k = jumlah kelas

f_i = % atau proporsi jumlah masyarakat dalam kelas ke-i

²⁰⁾ Anto Dajan, Pengantar Statistik, Jilid I. LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 7

Y^*_1 = % atau proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan masyarakat sampai kelas ke- i

Angka Gini Rasio terletak antara 0 dan 1, makin mendekati 0 (nol), semakin rendah tingkat ketimpangannya, sebaliknya semakin mendekati 1 (satu) semakin tinggi tingkat ketimpangan.

Hasil dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

- $0 < GR < 0,35$ maka ketimpangan rendah
- $0,35 < GR < 0,50$ maka ketimpangan sedang
- $GR > 0,50$ maka ketimpangan tinggi

Kurva Lorenz berguna sekali bagi penggambaran data tentang distribusi persentase pendapatan dalam hubungannya terhadap distribusi persentase jumlah keseluruhan orang yang menerima pendapatan. Penggambaran kurva Lorenz dimulai dengan mengubah data pendapatan jumlah penerima pendapatan ke dalam persentase serta kemudian menyusunnya ke dalam persentase distribus kumulatif sebagai contoh seperti terlihat pada tabel 5.1:

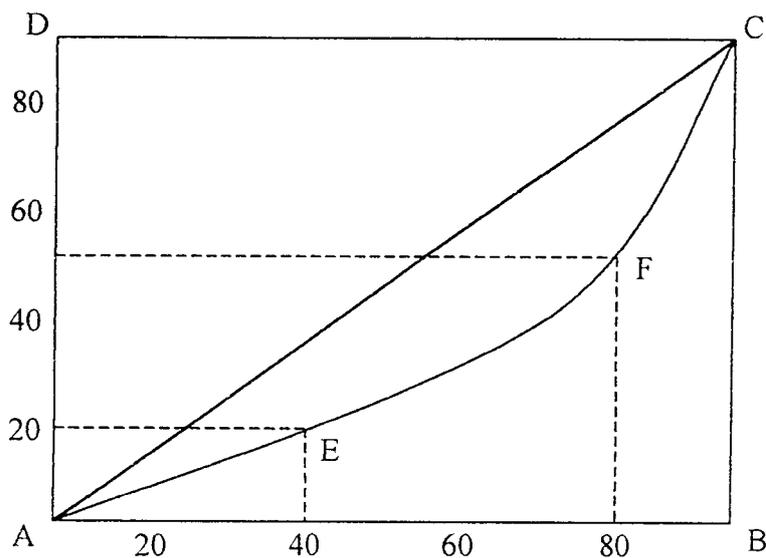
TABEL 5.1

DISTRIBUSI PERSENTASE PENDAPATAN PERKAPITA MENURUT GOLONGAN PENDAPATAN PROPINSI D.I YOGYAKARTA

Tahun	% penduduk yang dikumulasikan dari golongan pendapatan rendah sampai dengan golongan pendapatan tinggi	Jumlah pendapatan dalam % dari pendapatan keseluruhan	% Kumulatif
2002	40% Rendah	19,03	19,03
	40% Sedang	34,47	53,50
	20% Tinggi	46,51	100,00

Sumber: BPS Yogyakarta

Keterangan menunjukkan pada titik E, 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 19,03% dari total pendapatan, dan pada titik F penduduk berpendapatan rendah hingga sedang menerima 53,50% dari total pendapatan, padahal penduduk berpendapatan rendah sampai penduduk berpendapatan sedang jumlahnya 80% dari total penduduk sehingga masih terjadi ketimpangan meskipun rendah. Diasumsikan distribusi akan disebut merata dengan sempurna apabila 20% penduduk menerima 20% pendapatan, 40% penduduk menerima 40% pendapatan, 80% penduduk menerima 80% pendapatan dan seterusnya. Distribusi pendapatan dikatakan tidak merata atau akan sangat timpang apabila 99% pendapatan hanya dimiliki misalnya 1% dari jumlah penduduk.



GAMBAR 5.1

**KURVA LORENZ DISTRIBUSI PENDAPATAN PROPINSI
D. I YOGYAKARTA TAHUN 2002**

Keterangan:

- Sumbu datar AB menyatakan persentase jumlah penduduk
- Sumbu tegak AD menyatakan persentase pendapatan

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan penambahan barang dan jasa di suatu wilayah. Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB konstan yang didalamnya sudah terbebas dari pengaruh inflasi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pertumbuhan sektornya.

Pertumbuhan ekonomi regional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1988 ditunjukkan oleh kenaikan PDRB sebesar 5,44 persen. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 1987 sebesar 4,89 persen. Tahun 1989 merupakan tahun awal dari Pelita V, dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 1989 yang berkembang sebesar 7,39 persen, DIY berada sedikit di bawah perkembangan nasional tersebut, sumbangan DIY dalam pembentukan PDB Nasional hampir sebanding dengan prosentase penduduk DIY terhadap jumlah penduduk Indonesia. Dengan mulai membaiknya perekonomian dunia dan nasional khususnya serta adanya deregulasi dan debirokratisasi yang telah diambil oleh pemerintah telah ikut pula mendorong pertumbuhan ekonomi DIY semakin cepat. Berikut ini tabel mengenai laju pertumbuhan sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut Lapangan Usaha Tahun 1987-2002 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

TABEL 6.1.

PERTUMBUHAN SEKTOR PDRB PROPINSI D.I. YOGYAKARTA MENURUT
LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993
TAHUN 1987-2002 (PERSEN)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
LAPANGAN USAHA																
1. Pertanian	1,02	9,14	6,58	1,93	1,82	7,63	1,50	2,43	4,27	6,38	3,42	-5,39	-5,75	4,16	-1,60	-2,39
2. Pertambangan dan Penggalian	3,70	2,66	10,50	15,01	-11,30	6,76	0,60	0,80	5,73	3,31	2,26	15,79	0,00	0,50	0,60	0,17
3. Industri Pengolahan	19,35	18,41	6,39	9,97	18,65	15,15	6,47	17,6	5,5	9,40	1,04	-6,01	3,43	0,65	2,01	3,97
4. Listrik, Gas dan Air bersih	27,55	-6,21	13,73	13,39	9,03	5,40	8,96	16,96	8,05	11,45	7,08	0,18	2,23	2,31	2,30	3,95
5. Bangunan	1,94	5,31	2,75	3,38	5,24	11,63	5,85	6,91	9,40	7,88	3,76	-32,83	3,21	7,95	2,87	10,35
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,17	5,31	-6,92	10,88	6,75	7,74	8,22	8,43	8,46	10,51	3,8	10,53	2,56	6,60	7,47	2,38
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,71	2,82	-6,92	8,45	14,81	8,88	8,12	7,51	7,20	5,12	4,50	8,79	2,13	12,62	10,39	5,02
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,27	37,03	10,93	2,92	13,40	-21,13	30,12	12,38	12,38	8,88	4,27	-7,05	0,67	0,56	3,61	11,12
9. Jasa-jasa	3,63	5,39	8,60	4,07	7,61	7,66	5,10	7,97	10,47	7,21	4,67	12,47	2,32	5,04	1,54	4,21
PDRB	3,52	5,44	3,61	4,20	6,10	4,86	8,07	8,11	7,68	5,52	3,53	-11,28	1,01	4,01	3,37	4,02

Pada tahun 1991 merupakan tahun ketiga dari pelita V laju pertumbuhannya sebesar 6,10 persen lebih tinggi jika dibandingkan laju pertumbuhan tahun 1990 yang hanya sebesar 4,20. Berdasarkan harga konstan 1993, peranan sektor industri pengolahan, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa mengalami peningkatan. Sebaliknya sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran peranannya menurun. Secara sektoral pertumbuhan nilai tambah bruto pada tahun 1992 yang paling tinggi dicapai oleh sektor industri pengolahan sebesar 15,15 persen. Tingginya pertumbuhan sektor ini lebih banyak dipicu oleh sub sektor industri dan rumah tangga. Sektor lain yang mengalami pertumbuhan ekonomi kedua adalah sektor pertanian yang merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB dengan share 38,25 persen sedangkan pertumbuhannya sebesar 7,63 persen, jauh diatas pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang justru mengalami penurunan sebesar 1,82 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh naiknya sub sektor tanaman bahan makanan terutama peningkatan produksi pada kelompok padi dan palawija dengan komoditas yang menonjol jagung dan ketela pohon.

Tahun 1993 sebagai tahun terakhir pelita V telah berhasil dilewati dengan baik oleh DIY . Hal ini ditunjukkan dari perolehan angka pertumbuhan PDRB sebesar 8,07 persen. Kondisi ini tentu memberikan dukungan cukup mantap sebagai landasan pembangunan ekonomi regional

dalam memasuki pembangunan jangka panjang tahap II. Peranan ekonomi sektoral untuk sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 1,50 persen dibandingkan dengan tahun 1992. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya produksi beberapa komoditi bahan makanan antara lain padi, jagung dan kacang hijau. Sektor pertambangan dan penggalian pertumbuhannya sangat kecil hanya sebesar 0,60 persen, hal ini karena di DIY tidak banyak terdapat usaha pertambangan yang diusahakan besar-besaran.

Perolehan angka laju pertumbuhan ekonomi di tahun 1994 sebagai tahun awal Pelita VI mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,11 persen. Sejak pemerintah mulai memperhatikan industri kecil dan rumah tangga, peranan sub sektor ini nampak semakin penting. Karena disamping jumlah unit usahanya bertambah banyak, sub sektor ini banyak pula menyerap tenaga kerja terutama di daerah pedesaan. Secara agregat sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 17,6 persen. Sektor listrik, gas dan air minum yang dalam pengelolannya dimonopoli oleh pemerintah dalam hal ini PLN dan PDAM, pada tahun 1994 telah tumbuh sebesar 16,96 persen tetapi peranannya masih sangat kecil yakni sebesar 9,4 persen. Keadaan ini dimungkinkan karena pelayanan listrik dan air minum lebih banyak terjadi di kota, yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibanding penduduk yang bermukim di daerah pedesaan. Sekitar 84 persen rumah tangga di kota mendapatkan penerangan listrik dan lebih dari dua per tiga mendapatkan pelayanan air ledeng atau sumur pompa. Kondisi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan ketiga

tertinggi sebesar 12,38 persen dipengaruhi oleh sub sektornya yaitu sub sektor bank, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan.

Memasuki tahun kedua Pelita VI ini (tahun 1995) pertumbuhan ekonomi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 7,68 persen. Pertumbuhan ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,11 persen tetapi masih mampu melampaui target yang telah diproyeksikan oleh pemerintah sebesar 7,10 persen. Dari pertumbuhan masing-masing sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor bank, persewaan dan jasa perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan yang sangat tinggi dari sub sektor bank yakni sebesar 42,79 persen. Kenaikan sub sektor ini dipengaruhi oleh adanya penambahan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan penambahan Bank Swasta. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan. Semakin maraknya jumlah pedagang valuta asing semakin memacu pertumbuhan sub sektor jasa penunjang keuangan hingga mampu tumbuh sebesar 10,21 persen.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sebagai tempat tujuan wisata mendorong peningkatan produk domestik. Perkembangan dunia yang semakin cepat, serta proses globalisasi yang semakin meningkat membawa pengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan jaman. Hal ini mendorong semakin maraknya lembaga pendidikan swasta sehingga memacu pertumbuhan di sektor jasa-jasa

sebesar 10,47 persen. Menjelang terjadinya krisis ekonomi laju pertumbuhan ekonomi di tahun 1996 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,52 persen. Secara sektoral laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 11,45 mengalami kenaikan 8,05 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingginya pertumbuhan sektor ini dari kenaikan sub sektor air bersih dan sub sektor listrik masing-masing sebesar 13,3 persen dan 5,75 persen. Sedangkan laju pertumbuhan terendah terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,31 persen yang disebabkan oleh penurunan peranan sub sektor penggalian sebesar 2,26 persen.

Kondisi perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1997 ini diwarnai kegelapan. Keadaan ini secara menyeluruh dialami pula oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Berawal dari depresiasi nilai Rupiah terhadap US Dollar pada pertengahan tahun , terjadilah krisis ekonomi yang berkepanjangan, bahkan belum selesai hingga akhir tahun. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar ini disebabkan oleh terpuruknya sektor-sektor ekonomi karena krisis. Hutang luar negeri yang tidak terbayar pada waktunya, bahan baku impor yang tidak terbeli dan lesunya pasar karena kurs Dollar yang terlalu tinggi. Lebih memprihatinkan lagi, sektor pertanian yang diharapkan tidak terlalu terpengaruh oleh krisis ekonomi, pada tahun 1997 ini juga kurang berhasil karena faktor iklim. Pada tahun ini sektor pertanian hanya mampu tumbuh sebesar 3,42 persen lebih kecil dari tahun sebelumnya yang dapat mencapai 6,38 persen. Sebenarnya sub sektor perikanan dapat mencapai pertumbuhan yang tinggi yaitu 28,8

persen karena pembinaan terhadap petani sangat intensif dengan pendataan langsung lapangan, disertai dengan gerakan pembuatan kolam, khususnya bagi petani ikan lele. Tetapi kenaikan ini tidak didukung oleh sub sektor lainnya.

Sektor yang pertumbuhannya cukup besar adalah sektor jasa-jasa pertumbuhan sektor ini mencapai 4,67 persen, lebih kecil daripada tahun sebelumnya yang mencapai 7,21 persen. Menurunnya pertumbuhan sektor ini disebabkan oleh penurunan pendapatan asli daerah khususnya dari pajak, disamping adanya kebijakan *zero growth* dalam penerimaan pegawai dan terpuruknya kegiatan jasa perorangan dan rumah tangga karena krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi juga menyebabkan terpuruknya beberapa sektor ekonomi seperti industri pengolahan, sehingga untuk memenuhi konsumsi masyarakat DIY, ada peningkatan impor yang cukup besar.

Pada tahun 1998 kondisi perekonomian DIY ternyata lebih buruk dibandingkan dengan keadaan di tahun 1997. Dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian DIY ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan angka negatif yaitu sebesar -11,28 persen. Jadi boleh dikatakan pada tahun 1998 keadaan ekonomi DIY benar-benar terpuruk. Pada tahun 1999 perkembangan ekonomi DIY sudah mulai menunjukkan gejala kearah pemulihan ekonomi. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan angka positif yaitu berhasil mencapai angka 1,01 persen kemudian pada tahun 2000 perekonomian terus membaik

dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4.01 persen. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi secara sektoral mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB DIY mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor industri pengolahan dengan laju pertumbuhan 3,43 persen. Hal ini karena tetap bertahannya industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang jumlahnya cukup banyak di DIY. Timbulnya kreasi baru dalam membuat suatu barang kerajinan dengan bahan baku yang mudah diperoleh, menyebabkan usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga makin berkembang. Apalagi konsumen tidak hanya terbatas di wilayah DIY saja, bahkan beberapa barang kerajinan produksi Yogya diekspor ke luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi secara sektoral pada tahun 2001 menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian dengan laju pertumbuhan -1,60 persen. Sektor ekonomi yang pertumbuhannya tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 10,39 persen. Tingginya pertumbuhan sektor ini disebabkan oleh meningkatnya sub sektor pengangkutan sebesar 10,78 persen. Sedangkan di tahun 2002 sektor pertanian masih menunjukkan laju pertumbuhan yang negatif sebesar -2,39 persen dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 4,02 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,37 persen.

Selama kurun waktu 1993-2002 peranan kegiatan ekonomi diposisikan oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa-jasa. Pertanian bertendensi menurun, hal ini wajar mengingat beberapa sebab antara lain berkurangnya luas lahan pertanian karena beralih fungsi, kecepatan nilai tambah pertanian yang kalah dibandingkan kecepatan kenaikan nilai tambah sektor lain khususnya sektor industri dan perdagangan.

Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi dan pada akhir proses pembangunan ketimpangan menurun, yakni pada saat sektor industri di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari dari pedesaan. Jumlah PDRB (dalam nilai riil) sebagai proksi dari pendapatan perkapita dan indeks gini dari konsumsi (dalam presentase) sebagai proksi dari tingkat kesenjangan. Pada penelitian ini menunjukkan selama kurun waktu 1987-2002 pendapatan rata-rata per kepala meningkat dengan adanya dukungan dari sektor PDRB yang mengalami peningkatan dan kecenderungan tingkat kesenjangan ekonomi menunjukkan penurunan atau dapat dikatakan pembagian distribusi pendapatan telah merata. Jadi dapat disimpulkan yaitu antara kesenjangan dan pendapatan terjadi korelasi yang negatif, kesenjangan menurun (terjadi pemerataan) jika pendapatan naik.

Dengan mengikutsertakan pola distribusi pendapatan sebagai suatu variabel yang juga harus diamati perkembangannya selama proses

pembangunan berjalan, maka pembangunan ekonomi akan dapat dikatakan berhasil sepenuhnya apabila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kaya bisa diperkecil.

6.2 Perhitungan Distribusi Pendapatan

Perhitungan terhadap distribusi pendapatan dapat digunakan untuk kepentingan regional (propinsi, kabupaten dan kotamadya) agar perencanaan pembangunan dapat lebih diarahkan pada tujuan untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan mengetahui distribusi pendapatan penduduk dapat diperoleh gambaran seberapa jauh keberhasilan pembangunan ekonomi khususnya dalam pemerataan pendapatan yang dinikmati penduduk sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menentukan langkah kebijakan yang lebih baik pada masa mendatang.

Dapat diketahui pula apakah dalam distribusi pendapatan penduduk terjadi ketimpangan-ketimpangan, sehingga sasaran pembangunan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan yang dinikmati oleh sejumlah 40 persen penduduk berpendapatan rendah mengalami peningkatan atau penurunan. Pemerataan pendapatan penduduk dengan ketimpangan tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang tinggi dan hal tersebut dapat menyebabkan kerawanan sosial yang semakin meningkat. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang selanjutnya akan mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. ²¹⁾

²¹⁾ *Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan, op.cit, hlm.3*

Perhitungan terhadap distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis antara lain Gini Indeks dan Kurva Lorenz.

6.2.1 Indeks Gini

Berdasarkan indeks gini hal yang dilihat atau dikemukakan adalah hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Besarnya koefisien gini antara lain dapat dilakukan melalui pendekatan Kurva Lorenz. Rasio Gini harus terletak antara 0 dan 1, makin mendekati nol, makin rendah konsentrasinya dan makin merata distribusi pendapatan. Makin mendekati 1 makin tinggi konsentrasinya dan makin tidak merata distribusi pendapatannya. Gini indeks dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^k f_i (Y^*_i - Y^*_{i-1})$$

Dimana:

GC = Angka Gini koefisien

k = Jumlah kelas

f_i = % atau proporsi jumlah masyarakat dalam kelas ke-i

Y^*_i = % atau proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan masyarakat sampai kelas ke-i

Hasil dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

- $0 < GR < 0,35$ maka ketimpangan rendah
- $0,35 < GR < 0,50$ maka ketimpangan menengah

- $GR < 0,50$ maka ketimpangan tinggi²²⁾

Hasil penghitungan dengan Indeks Gini di Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah sebagai berikut:

TABEL 6.2.

**PERSENTASE PENDAPATAN PER KAPITA DIRINCI MENURUT
GOLONGAN PENDAPATAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 1987 – 2002**

Tahun	Golongan		
	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi
1987	21,97	37,57	40,46
1988	21,97	37,57	40,46
1989	21,97	37,57	40,46
1990	20,11	34,69	45,20
1991	20,11	34,69	45,20
1992	20,57	35,39	44,04
1993	21,02	36,09	42,89
1994	20,73	35,82	43,45
1995	20,45	35,55	43,99
1996	20,17	35,28	44,55
1997	12,15	13,53	74,32
1998	9,51	14,07	76,43
1999	20,60	35,30	44,11
2000	28,81	35,65	35,54
2001	20,45	35,29	44,26
2002	19,03	34,47	46,51

Sumber: SUSENAS, Badan Pusat Statistik, DIY, (diolah)

²²⁾ Anto Dajan, op.cit, hlm. 106

Data diatas menggambarkan proporsi jumlah masyarakat dari setiap kelas golongan pendapatan yaitu 40% dari seluruh masyarakat adalah masyarakat golongan pendapatan rendah, 40% dari seluruh masyarakat adalah masyarakat golongan pendapatan sedang atau menengah, 20% dari seluruh masyarakat adalah masyarakat golongan pendapatan tinggi. Selain itu juga dapat diketahui % atau proporsi dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima setiap golongan pendapatan dalam masyarakat.

Sebagai contoh 40% golongan pendapatan rendah pada tahun 1987 menerima 21,97 dari total pendapatan yang diterima masyarakat, 40% golongan pendapatan sedang menerima 37,57 dari total pendapatan yang diterima masyarakat, 20% golongan pendapatan tinggi menerima 40,46 dari total pendapatan yang diterima masyarakat. Pada tahun 1990, 40% golongan pendapatan rendah menerima 20,11 dari total pendapatan yang diterima masyarakat, 40% golongan pendapatan sedang menerima 34,69 dari total pendapatan yang diterima masyarakat, 20% golongan pendapatan tinggi menerima 45,20 dari total pendapatan yang diterima masyarakat dan seterusnya hingga tahun 2002.

Setelah mengetahui persentase pendapatan yang diterima dari setiap golongan pendapatan maka digunakanlah rumus indeks gini guna mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan yang

terjadi. Setelah diketahui distribusi persentase kumulatifnya maka dapat diketahui % pendapatan secara kumulatif.

TABEL 6.3.

**HASIL PERHITUNGAN INDEKS GINI
PROPINSI D. I. YOGYAKARTA
TAHUN 1987 – 2002**

Tahun	Indeks Gini
1987	0,2670
1988	0,2670
1989	0,2670
1990	0,31032
1991	0,31032
1992	0,29968
1993	0,24714
1994	0,2975
1995	0,3004
1996	0,30594
1997	0,54872
1998	0,89772
1999	0,2998
2000	0,18276
2001	0,30196
2002	0,32676

Melihat hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan di Propinsi D.I. Yogyakarta dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2002 relatif rendah sesuai dengan kriteria indeks gini, yaitu:

- $0 < GR < 0,35$ maka ketimpangan rendah
- $0,35 < GR < 0,50$ maka ketimpangan sedang
- $GR > 0,50$ maka ketimpangan tinggi

Rata-rata indeks gini Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1987 - 2002 adalah 0,27688 atau lebih kecil dari 0,35 dan lebih besar dari 0, termasuk ketimpangan rendah atau dapat disimpulkan 40% penduduk dengan pendapatan rendah di Propinsi D.I Yogyakarta menerima lebih besar dari 17% pendapatan. Hal ini bisa terjadi disebabkan salah satu faktornya adalah terus membaiknya laju pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima masyarakat.

6.2.2 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah bentuk khusus dari kurva frekuensi persentasi kumulatif yang berguna sekali bagi penggambaran data tentang distribusi persentasi kekayaan/pendapatan dalam hubungannya terhadap distribusi persentasi jumlah keseluruhan orang yang menerima pendapatan tersebut.²³⁾ Kurva Lorenz sebetulnya menggambarkan dispersi distribusi frekuensi secara relatif. Garis linier bersudut 45° dinamakan garis distribusi merata. Untuk lebih jelasnya kurva Lorenz dari distribusi persentase pendapatan penduduk pada setiap golongan pendapatan secara keseluruhan tahun 1987 sampai dengan 2002 dapat dilihat pada lampiran III.

²³⁾ Ibid, hlm. 104

Tahun 1987 diketahui bahwa pada titik A, 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 21,97% dari total pendapatan dan pada titik B penduduk berpendapatan rendah hingga sedang menerima 59,54% dari total pendapatan, padahal penduduk berpendapatan rendah sampai penduduk berpendapatan sedang jumlahnya 80% dari total penduduk, sehingga masih terjadi ketimpangan meskipun rendah (gambar 6.1, halaman 80). Keadaan yang sama ditunjukkan pula pada tahun 1988 dan 1989 (gambar 6.2 dan 6.3, halaman 80).

Pada tahun 1990 dan 1991 meskipun masih dikatakan rendah, ketimpangan bertambah lebar yaitu pada titik A, 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 20,11% dari total pendapatan yang diterima masyarakat dan di titik B penduduk berpendapatan rendah hingga sedang menerima 54,8% dari total pendapatan yang diterima masyarakat (gambar 6.4 dan 6.5, halaman 80). Pada tahun 1992 di titik A, 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 20,57% dari total pendapatan dan di titik B penduduk berpendapatan rendah hingga sedang menerima 55,96% dari total pendapatan yang diterima masyarakat (gambar 6.6, halaman 80).

Titik A kurva Lorenz menunjukkan 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 21,02% dari total pendapatan yang diterima masyarakat dan pada titik B menunjukkan dari penduduk berpendapatan rendah hingga berpendapatan sedang menerima

57,11% dari total pendapatan yang diterima masyarakat pada tahun 1993 pada (gambar 6.7, halaman 81). Pada tahun 1994 pada titik A, 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 20,73% dari total pendapatan yang diterima masyarakat dan pada titik B penduduk berpendapatan rendah hingga sedang menunjukkan 56,55% dari total pendapatan yang diterima masyarakat (gambar 6.8, halaman 81).

Pada tahun 1995 pada titik A, 40% penduduk yang berpendapatan rendah menerima 20,45% dari total pendapatan yang diterima masyarakat dan pada titik B penduduk berpendapatan rendah hingga sedang menerima 56% dari total pendapatan yang diterima masyarakat (gambar 6.9, halaman 81). Seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya pada tahun 1996 tidak terjadi perubahan yang mencolok ketimpangan masih terjadi meskipun rendah, di titik A kurva Lorenz menunjukkan 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 20,17% dari total pendapatan yang diterima masyarakat dan di titik B menunjukkan dari penduduk berpendapatan rendah hingga berpendapatan sedang menerima 55,45% dari total pendapatan yang diterima masyarakat (gambar 6.10, halaman 81).

Pada tahun 1997 terjadi perubahan yang tajam yaitu ketimpangan yang terjadi tinggi karena pemerataan pendapatan semakin tidak merata yaitu pada titik A kurva Lorenz menunjukkan 40% penduduk yang berpendapatan rendah menerima 12,15% dari total pendapatan yang diterima masyarakat dan pada titik B

menunjukkan penduduk berpendapatan rendah hingga berpendapatan sedang menerima 25,68% dari total pendapatan yang diterima masyarakat (gambar 6.11, halaman 81). Terjadi keadaan yang sama pada tahun 1998 yaitu di titik A, 40% penduduk yang berpendapatan rendah menerima 9,51% dari total pendapatan yang diterima masyarakat dan di titik B penduduk berpendapatan rendah hingga berpendapatan sedang menerima 23,58% dari total pendapatan yang diterima masyarakat (gambar 6.12, halaman 81).

Keadaan mulai membaik pada tahun 1999 di titik A, 40% penduduk yang berpendapatan rendah menerima 20,60% dari total pendapatan yang diterima masyarakat dan di titik B penduduk yang berpendapatan rendah hingga berpendapatan sedang menerima 55,90% dari total pendapatan yang diterima masyarakat (gambar 6.13, halaman 82). Di tahun 2000 terjadi ketimpangan yang cukup rendah atau dapat dikatakan distribusi pendapatan semakin merata, pada titik A kurva Lorenz menunjukkan 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 28,81% dari total pendapatan yang diterima masyarakat dan di titik B menunjukkan dari penduduk berpendapatan rendah hingga berpendapatan sedang menerima 64,46% dari total pendapatan yang diterima masyarakat (gambar 6.14, halaman 82).

Pada tahun 2001 yaitu, kurva Lorenz menunjukkan pada titik A 40% penduduk yang berpendapatan rendah menerima 20,45% dari

total pendapatan yang diterima masyarakat dan di titik B penduduk yang berpendapatan rendah hingga berpendapatan sedang menerima 55,74% dari total pendapatan yang diterima masyarakat, padahal jumlah penduduk berpendapatan rendah sampai berpendapatan sedang berjumlah 80% dari total penduduk (gambar 6.15, halaman 82).

Keadaan tidak jauh berbeda pada tahun 2002 kurva Lorenz menunjukkan pada titik A penduduk yang berpendapatan rendah menerima 19,03% dari total pendapatan yang diterima masyarakat dan pada titik B penduduk yang berpendapatan rendah hingga berpendapatan sedang menerima 53,50% dari total pendapatan yang diterima masyarakat (gambar 6.16, halaman 82). Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan ketimpangan distribusi pendapatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan dengan gambar Kurva Lorenz mendekati garis distribusi merata.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai laju pertumbuhan ekonomi dengan indikator PDRB serta pemerataan distribusi pendapatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan indikator PDRB di Propinsi D.I Yogyakarta mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan pada kurun waktu 1987-2002 mengalami percepatan dari 3,52% - 4,02%. Dampak krisis ekonomi mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan PDRB pada tahun 1998 sebesar -11,28%. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola SDA dan SDM serta seberapa besar kinerja pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh wilayah itu sendiri.
2. Hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus Indeks Gini, maka dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata nilainya selalu kurang dari 0,35 yang menunjukkan kesenjangan yang terjadi antar golongan pendapatan relatif rendah.

Saran

1. Terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disarankan kepada pemerintah dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung bagi pembangunan tidak hanya terpusat di beberapa wilayah saja namun menjangkau banyak wilayah. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kesempatan berusaha yang sama antar wilayah sehingga nantinya hasil yang diperoleh dapat merata dinikmati oleh seluruh masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola SDA dan SDM pemerintah disarankan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan potensi daerah yang dimiliki yang diharapkan akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi sehingga dapat untuk memajukan pembangunan di wilayah itu sendiri.
3. Berdasarkan kesimpulan di atas, terkait dengan masalah distribusi pendapatan. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disarankan untuk mendorong ekonomi masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah dengan cara memacu investasi yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dengan cara membangun sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta mengadakan program perluasan

kesempatan kerja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengangguran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap distribusi pendapatan atau dengan kata lain upaya di atas dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyani, Ullly (2001), *Tingkat Pemerataan Distribusi Pendapatan Kabupaten Temanggung*, Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ahluwalia, S. Montek (1974), *Penelitian Tentang Distribusi Pendapatan*, BPS, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln (1998), *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (2000), *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemerataan Pendapatan Penduduk Propinsi DIY*, Yogyakarta.
- (2003), *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*, Yogyakarta.
- (2001), *Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan*, Yogyakarta.
- Boediyono (1985), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Dajan, Anto (1987), *Pengantar Metode Statistik*, LP3ES, Jakarta.
- Gemmel, Norman (1992), *Ilmu Ekonomi Pembangunan*, Pustaka, LP3ES, Jakarta.
- Irawan dan Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keenam*, BPFE, Yogyakarta.
- Rimawan, Hinu (1999), *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pemerataan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Pemalang*, Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono (1985), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Tambunan, T.H. Tulus (2001), *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, P. Michael (1995), *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*, Bumi Aksra, Jakarta.
- (1998), *Pembangunan Ekonomi Di Dunia ke 3 Jilid 1*, Erlangga, Jakarta.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TABEL 1

Distribusi Persentase Pendapatan Penduduk
Setiap Golongan Pendapatan Dan
Prosentase Kumulatifnya

Tahun	Golongan Pendapatan (%)	Prosentase Pendapatan	% Kumulatif
1987	40% Rendah	21,97	21,97
	40% Sedang	37,57	59,54
	20% Tinggi	40,46	100,00
1988	40% Rendah	21,97	21,97
	40% Sedang	37,57	59,54
	20% Tinggi	40,46	100,00
1989	40% Rendah	21,97	21,97
	40% Sedang	37,57	59,54
	20% Tinggi	40,46	100,00
1990	40% Rendah	20,11	20,11
	40% Sedang	34,69	54,80
	20% Tinggi	45,20	100,00
1991	40% Rendah	20,11	20,11
	40% Sedang	34,69	54,80
	20% Tinggi	45,20	100,00
1992	40% Rendah	20,57	20,57
	40% Sedang	35,39	55,96
	20% Tinggi	44,04	100,00
1993	40% Rendah	21,02	21,02
	40% Sedang	36,09	57,11
	20% Tinggi	42,89	100,00

TABEL. 1 (Lanjutan)

Tahun	Golongan Pendapatan (%)	Prosentase Pendapatan	% Kumulatif
1994	40% Rendah	20,73	20,73
	40% Sedang	35,82	56,55
	20% Tinggi	43,45	100,00
1995	40% Rendah	20,45	20,45
	40% Sedang	35,55	56,00
	20% Tinggi	43,99	100,00
1996	40% Rendah	20,17	20,17
	40% Sedang	35,28	55,45
	20% Tinggi	44,55	100,00
1997	40% Rendah	12,15	12,15
	40% Sedang	13,53	25,68
	20% Tinggi	74,32	100,00
1998	40% Rendah	9,51	9,51
	40% Sedang	14,07	23,58
	20% Tinggi	26,43	100,00
1999	40% Rendah	20,60	20,60
	40% Sedang	35,30	55,90
	20% Tinggi	44,11	100,00

Tahun	Golongan Pendapatan (%)	Prosentase Pendapatan	% Kumulatif
2000	40% Rendah	28,81	28,81
	40% Sedang	35,65	64,46
	20% Tinggi	35,54	100,00
2001	40% Rendah	20,45	20,45
	40% Sedang	35,29	55,74
	20% Tinggi	44,26	100,00
2002	40% Rendah	19,03	19,03
	40% Sedang	34,47	53,50
	20% Tinggi	46,51	100,00

LAMPIRAN II

TABEL. 2

Prosedur Penghitungan Indeks Gini Distribusi Pendapatan
Di Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1987 - 2002

Tahun	Golongan Pendapatan (%)	% Pendapatan secara Kumulatif	$(Y^*_i + Y^*_{i-1})$	$f_i (Y^*_i + Y^*_{i-1})$
1987	40% Rendah	0,2197	0,2197	0,08788
	40% Sedang	0,5954	0,8151	0,32604
	20% Tinggi	1,000	1,5954	0,31908
1988	40% Rendah	0,2197	0,2197	0,08788
	40% Sedang	0,5954	0,8151	0,32604
	20% Tinggi	1,000	1,5954	0,31908
1989	40% Rendah	0,2197	0,2197	0,08788
	40% Sedang	0,5954	0,8151	0,32604
	20% Tinggi	1,000	1,5954	0,31908
1990	40% Rendah	0,2011	0,2011	0,08044
	40% Sedang	0,548	0,7491	0,29964
	20% Tinggi	1,000	1,548	0,3096
1991	40% Rendah	0,2011	0,2011	0,08044
	40% Sedang	0,548	0,7491	0,29964
	20% Tinggi	1,000	1,548	0,3096
1992	40% Rendah	0,2057	0,2057	0,08228
	40% Sedang	0,5596	0,7653	0,30612
	20% Tinggi	1,000	1,5596	0,31192
1993	40% Rendah	0,2102	0,2102	0,08408
	40% Sedang	0,5711	0,7813	0,31252
	20% Tinggi	1,000	1,5711	0,35626
1994	40% Rendah	0,2073	0,2073	0,08292
	40% Sedang	0,5611	0,7684	0,30736
	20% Tinggi	1,000	1,5611	0,31222

TABEL. 2 (Lanjutan)

Tahun	Golongan Pendapatan (%)	% Pendapatan secara Kumulatif	$(Y^*_i + Y^*_{i-1})$	$f_i (Y^*_i + Y^*_{i-1})$
1995	40% Rendah	0,2045	0,2045	0,0818
	40% Sedang	0,56	0,7645	0,3058
	20% Tinggi	1,000	1,56	0,312
1996	40% Rendah	0,2017	0,2017	0,08068
	40% Sedang	0,5545	0,7562	0,30248
	20% Tinggi	1,000	1,5545	0,3109
1997	40% Rendah	0,1215	0,1215	0,0486
	40% Sedang	0,2568	0,3783	0,15132
	20% Tinggi	1,000	1,2568	0,25136
1998	40% Rendah	0,951	0,951	0,3804
	40% Sedang	0,2358	1,1868	0,47472
	20% Tinggi	1,000	1,2358	0,24716
1999	40% Rendah	0,2060	0,2060	0,0824
	40% Sedang	0,5590	0,765	0,306
	20% Tinggi	1,000	1,5590	0,3118
2000	40% Rendah	0,2881	0,2881	0,11524
	40% Sedang	0,6446	0,9327	0,37308
	20% Tinggi	1,000	1,6446	0,32892
2001	40% Rendah	0,2045	0,2045	0,0818
	40% Sedang	0,5574	0,76199	0,30476
	20% Tinggi	1,000	1,5574	0,31148
2002	40% Rendah	0,1903	0,1903	0,07612
	40% Sedang	0,5350	1,5350	0,29012
	20% Tinggi	1,000	1,5350	0,307

Dengan rumus Indeks Gini maka dapat diketahui sebagai berikut:

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^k f_i (Y^*_i - Y^*_{i-1})$$

- $GC (1987) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2197) + 40\% (0,8151) + 20\% (1,5954)$

$$GC (1987) = 1 - 0,733 = 0,267$$

- $GC (1988) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2197) + 40\% (0,8151) + 20\% (1,5954)$

$$GC (1988) = 1 - 0,733 = 0,267$$

- $GC (1989) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2197) + 40\% (0,8151) + 20\% (1,5954)$

$$GC (1989) = 1 - 0,733 = 0,267$$

- $GC (1990) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2011) + 40\% (0,7491) + 20\% (1,548)$

$$GC (1990) = 1 - 0,68968 = 0,31032$$

- $GC (1991) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2011) + 40\% (0,7491) + 20\% (1,548)$

$$GC (1991) = 1 - 0,68968 = 0,31032$$

- $GC (1992) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2057) + 40\% (0,7653) + 20\% (1,5596)$

$$GC (1992) = 1 - 0,70032 = 0,29968$$

- $GC (1993) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2102) + 40\% (0,7813) + 20\% (1,5711)$

$$GC (1993) = 1 - 0,75286 = 0,24714$$

- $GC (1994) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2073) + 40\% (1,7684) + 20\% (1,5611)$

$$GC(1994) = 1 - 0,7025 = 0,2975$$

- $GC(1995) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2045) + 40\% (0,7645) + 20\% (1,56)$

$$GC(1995) = 1 - 0,6996 = 0,3004$$

- $GC(1996) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2017) + 40\% (0,7562) + 20\% (1,5545)$

$$GC(1996) = 1 - 0,69406 = 0,30594$$

- $GC(1997) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,1215) + 40\% (0,3783) + 20\% (1,2568)$

$$GC(1997) = 1 - 0,45128 = 0,54872$$

- $GC(1998) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,951) + 40\% (1,1868) + 20\% (1,2358)$

$$GC(1998) = 1 - 0,10228 = 0,89772$$

- $GC(1999) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2060) + 40\% (0,765) + 20\% (1,5590)$

$$GC(1999) = 1 - 0,7002 = 0,2998$$

- $GC(2000) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2881) + 40\% (0,9327) + 20\% (1,6446)$

$$GC(2000) = 1 - 0,81724 = 0,18276$$

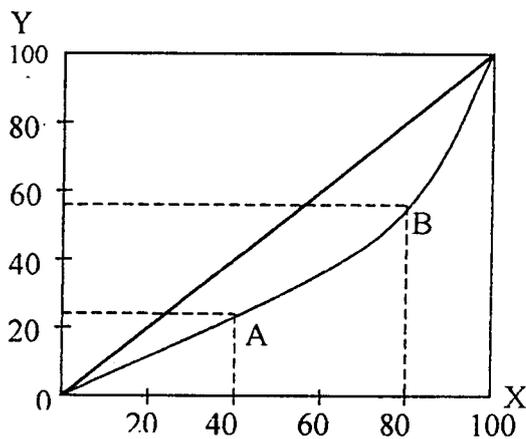
- $GC(2001) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,2045) + 40\% (0,7619) + 20\% (1,5574)$

$$GC(2001) = 1 - 0,69804 = -0,30196$$

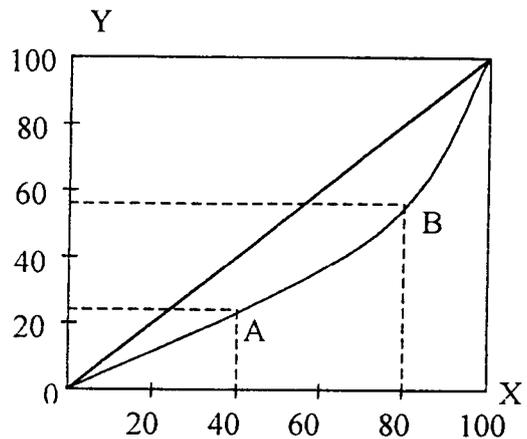
- $GC(2002) = 1 - \sum_{i=1}^3 . 40\% (0,1903) + 40\% (0,2902) + 20\% (0,307)$

$$GC(2002) = 1 - 0,67324 = 0,32676$$

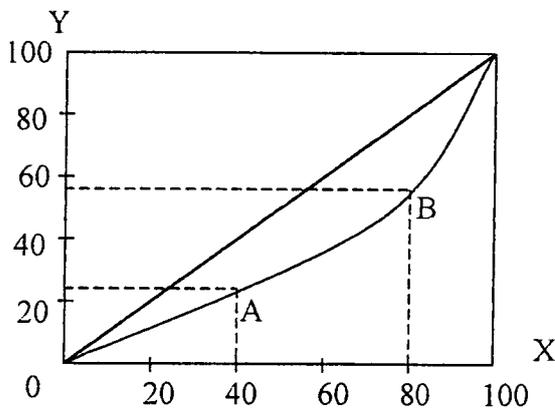
LAMPIRAN III



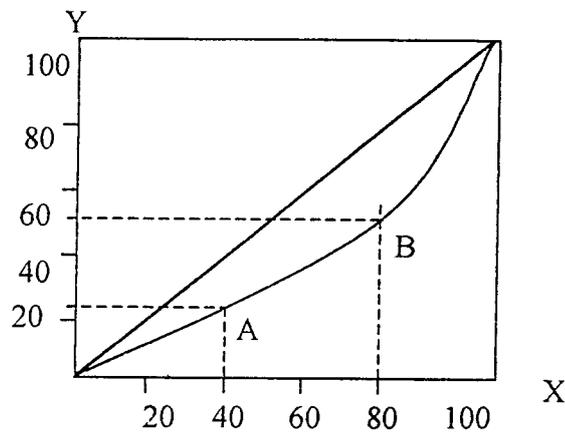
Gambar 6.1
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1987



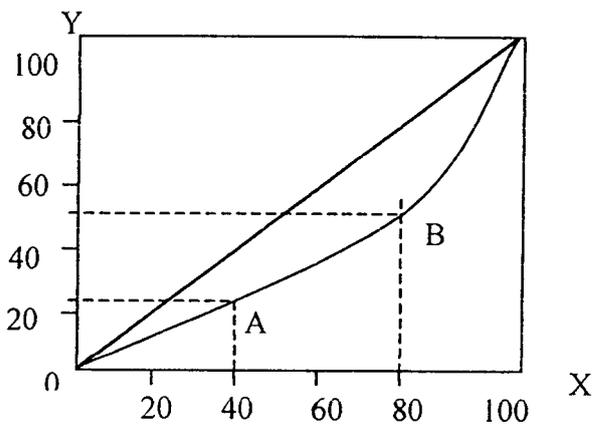
Gambar 6.2
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1988



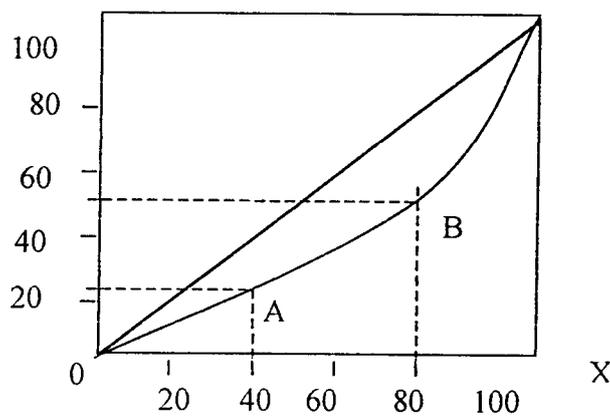
Gambar 6.3
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1989



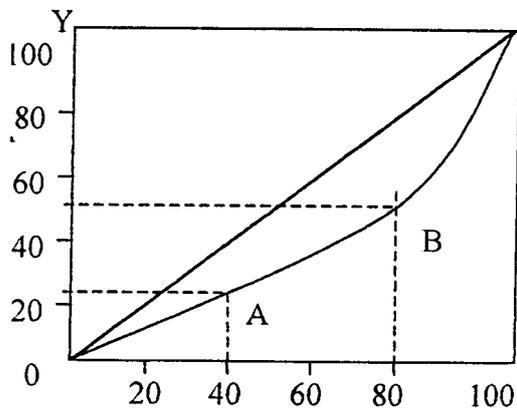
Gambar 6.4
Kurva Lorenz Distribusi pendapatan Tahun 1990



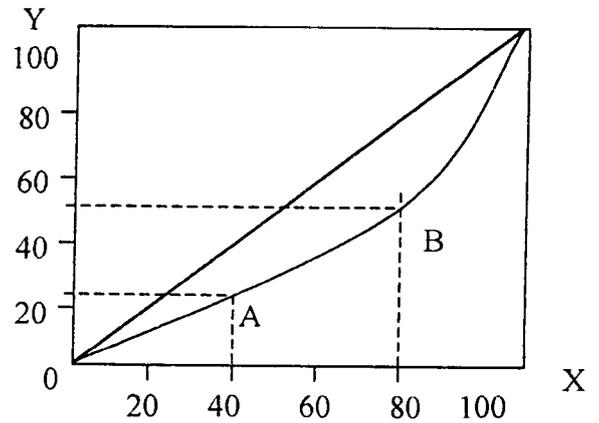
Gambar 6.5
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1991



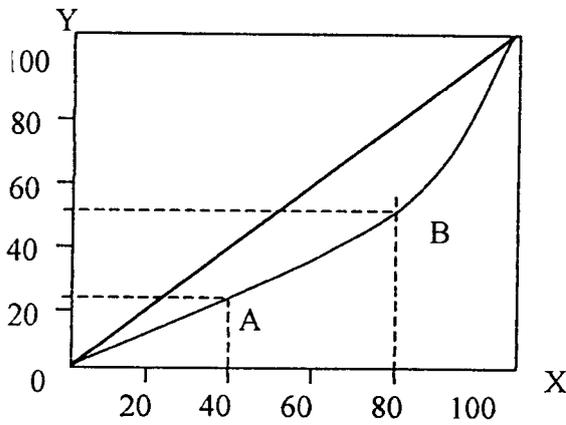
Gambar 6.6
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1992



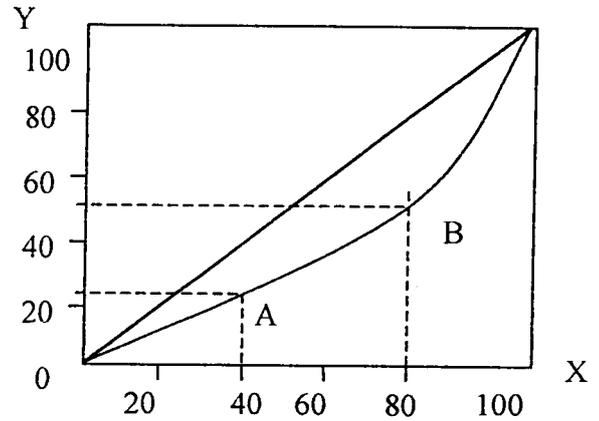
Gambar 6.7
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1993



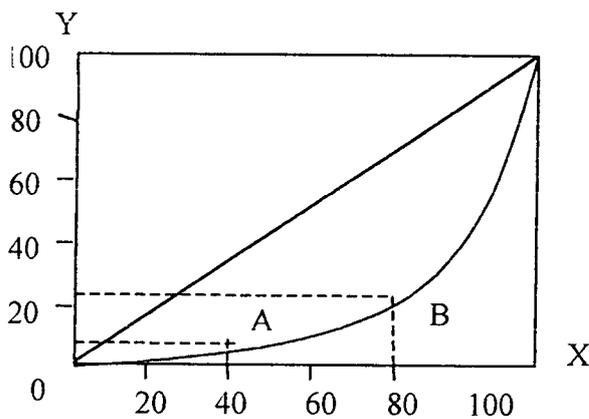
Gambar 6.8
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1994



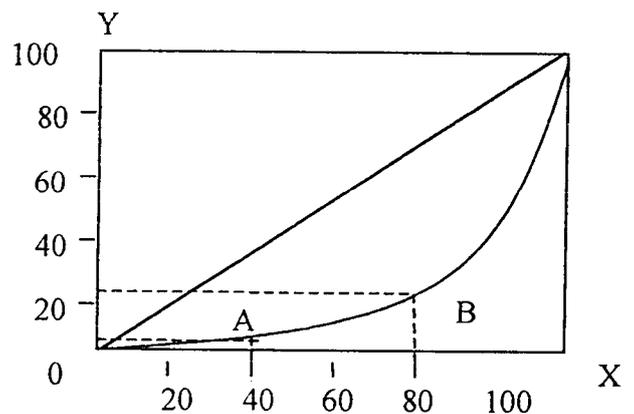
Gambar 6.9
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1995



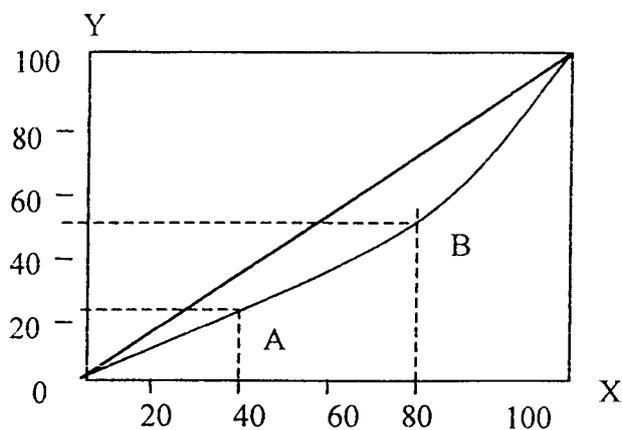
Gambar 6.10
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1996



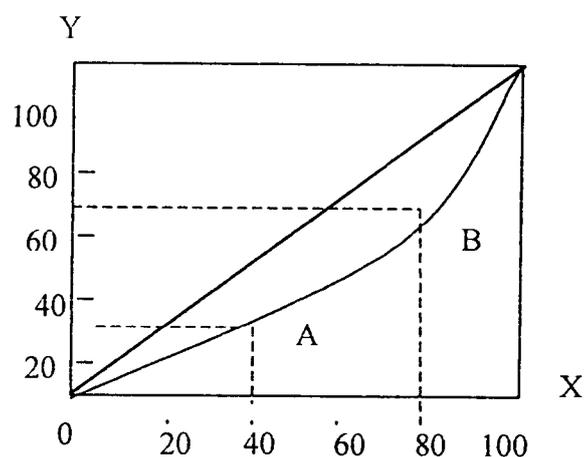
Gambar 6.11
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1997



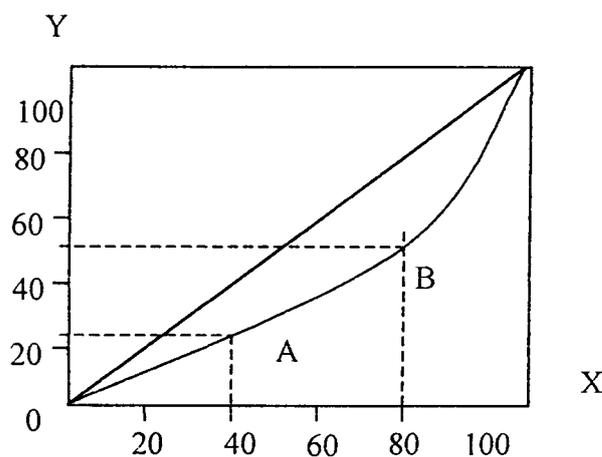
Gambar 6.12
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1998



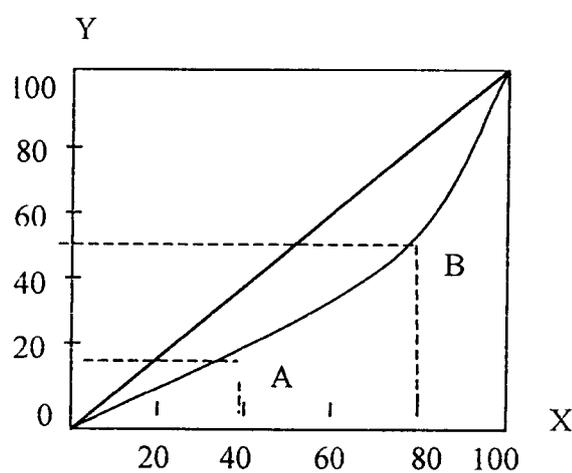
Gambar 6.13
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 1999



Gambar 6.14
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 2000



Gambar 6.15
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 2001



Gambar 6.16
Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Tahun 2002

Keterangan:

Y = Jumlah pendapatan dalam % dari seluruh pendapatan masyarakat secara kumulatif

X = Jumlah penduduk dalam % dari keseluruhan